LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2023

Pusat Analisis dan Layanan Informasi

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: *www.komisiyudisial.go.id*
Email: *kyri@komisiyudisial.go.id*

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

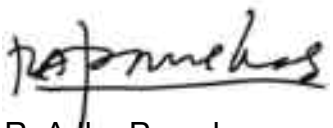

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

Kata Pengantar

Segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) masih terus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi di tahun 2023 ini. Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Palinfo mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan data dan layanan informasi, hubungan masyarakat, serta pembinaan jabatan fungsional Penata Kehakiman di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pada tahun 2023, Palinfo melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) kelembagaan. Target kinerja sebagaimana yang dimuat dalam Renstra tersebut dilaksanakan oleh dua bidang yaitu: 1). Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman; dan 2). Bidang Data dan Layanan Informasi. Target kinerja Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yaitu memberikan rekomendasi kebijakan praktis bagi pimpinan untuk menyikapi isu peradilan dan melakukan kajian untuk mendukung penguatan tugas dan fungsi kelembagaan Komisi Yudisial. Sementara itu, Bidang Data dan Layanan Informasi memiliki target kinerja sebagai berikut: pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi; pemutakhiran data dan informasi; sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi; layanan informasi publik; monitoring media; edukasi publik; pengelolaan perpustakaan; dan penyusunan dan pencetakan bahan diseminasi publik di bidang yudisial. Selain itu, Palinfo juga memiliki target kinerja berupa peningkatan layanan perkantoran.

Daftar Isi

Kata Pengantar..... 2
Daftar Isi 3
Bab I Pendahuluan 4
Bab II Perencanaan Kinerja Palinfo Tahun 2023 8
Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 15
Bab IV Penutup 112
Lampiran 113

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pencapaian target kinerja Palinfo sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2023, serta penyerapan anggarannya untuk pencapaian target tersebut.

Jakarta, Januari 2024

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi,

Juma'in
NIP. 196805151989121001

BAB I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk jangka waktu lima tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Sebagaimana amanat tersebut, Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya telah menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, serta program dan kegiatan untuk Periode 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024. Palinfo diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan visi Komisi Yudisial yang tercantum dalam Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024 yaitu ”Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Palinfo mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan data dan layanan informasi,

hubungan masyarakat, serta pembinaan jabatan fungsional Penata Kehakiman di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugasnya Palinfo menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan;
2. Penyusunan desain, penelaahan dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial;
3. Perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyediaan basis data;
4. Penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan;
5. Pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
6. Penerjemahan lisan dan/atau tulisan;
7. Evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

2. Struktur Organisasi

Pusat Analisis dan Layanan Informasi terdiri atas:

1. Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
2. Bidang Data dan Layanan Informasi; dan
3. Sub Bidang Fasilitasi Pembinaan JF Penata Kehakiman
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, desain, penelaahan, dan perumusan hasil analisis dan kajian terhadap hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan analisis, serta evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Sementara Bidang Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas penyusunan rencana, kegiatan, perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan basis data, penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi; pelaksanaan hubungan masyarakat; penerjemahan secara tertulis dan/atau lisan; pengelolaan perpustakaan; dan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengelolaan data dan layanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Palinfo didukung oleh sumber daya manusia dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1
SDM Pusat Analisis dan Layanan Informasi Berdasarkan
Status Kepegawaian, Pendidikan, dan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Berdasarkan Status Kepegawaian			Berdasarkan Pendidikan			Berdasarkan Jenis Kelamin	
	CPNS	PNS	PPNPNS /Jasa Lainnya	D-III	S1	S2	L	P
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	25	5	5	16	9	16	14

3. Isu Strategis

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024. Isu strategis prioritas dari Palinfo pada tahun ini disesuaikan dengan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024 yaitu melakukan strategi perencanaan komunikasi publik, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dan meningkatkan reputasi lembaga. Namun, implementasi dari isu strategis ini belum optimal karena Tim Komunikasi Krisis belum terbentuk sesuai dengan peta jalan yang telah disusun.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2020 s.d 2024

Sejalan dengan Renstra Komisi Yudisial periode 2020 s.d 2024, Palinfo mengukuhkan peran dan fungsinya melalui visi sebagai berikut:

"Terwujudnya pemberdayaan stakeholder dan publik yang partisipatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi"

Untuk mewujudkan visi tersebut, Palinfo menjabarkannya ke dalam misi, sebagai berikut:

a. Meningkatkan partisipasi stakeholder dan publik;
b. Meningkatkan integrasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Palinfo serta kontribusi pencapaian Palinfo pada Sasaran Program dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	a) Pengembangan aplikasi yang terintegrasi	3 Aplikasi
		b) Persentase pemutakhiran data dan informasi	70%
2	Terkelolanya sistem manajemen keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001
3	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomendasi
4	Meningkatnya efektivitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	a. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)	Menuju Informatif
		b. Kategori publisitas positif media monitoring	Kategori positif
5	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	- Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	15%
		- Laporan pengelolaan perpustakaan	1 laporan
		- Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial	45.000
6	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas

C. Konstribusi dalam Pencapaian Sasaran Strategis Lembaga

Palinfo memiliki dua sasaran program untuk mendukung pencapaian sasaran program dan sasaran strategis lembaga. Sasaran program yang pertama yaitu terlaksananya pemberdayaan stakeholder dan publik. Indikator kinerja sasaran program tersebut adalah persentase kontribusi stakeholder Komisi Yudisial (KY) dan publik. Pada tahun 2023, target persentase kontribusi stakeholder KY dan publik adalah 65%. Sasaran program Palinfo yang kedua adalah terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif. Indikator kinerja sasaran program kedua ini adalah persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90% pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga memanfaatkan teknologi informasi. Kedua sasaran program Palinfo sebagaimana disebutkan di atas diharapkan dapat mendukung dua sasaran strategis lembaga.

Renstra Komisi Yudisial periode 2020 s.d 2024 mencantumkan dua sasaran strategis lembaga yaitu meningkatnya integritas hakim dan meningkatnya kapasitas manajemen internal. Untuk sasaran strategis pertama, meningkatnya integritas hakim, telah ditetapkan indikator kinerjanya yaitu indeks integritas hakim mencapai skor 7,68 pada tahun 2023. Adapun indikator kinerja untuk sasaran strategis lembaga yang kedua, meningkatnya kapasitas manajemen internal, terdiri atas dua hal. Pertama, nilai indeks reformasi birokrasi pada tahun 2023 ditargetkan mencapai kategori “A”. Kedua, nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat “Baik” pada tahun 2024. Data mengenai sasaran program Palinfo untuk mendukung penetapan kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan sasaran strategis Komisi Yudisial pada tahun 2023 disajikan dalam dua tabel di bawah ini:

- **Kontribusi Palinfo dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial**

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
1	Terlaksananya pemberdayaan s*takeholder* dan publik	Persentase kontribusi *stakeholder* KY dan publik	65 %	Rekapitulasi jumlah *stakeholder* dan publik KY
2	Terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang lembaga	90%	Rekapitulasi jumlah aplikasi yang dihasilkan

- **Target Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023**

Tabel 2.3
Target Kinerja Komisi Yudisial Berdasarkan Kerangka Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
1	Meningkatnya integritas hakim	Indeks Integritas Hakim	7,68	Rekapitulasi hasil survey terbatas kepada hakim
2	Meningkatnya kapasitas manajemen internal	Nilai akuntabiltas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Sangat Baik	Surat Menpan terkait hasil nilai SAKIP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori “A” di tahun 2024	A	Surat Menpan terkait hasil evaluasi RB K/L

D. Rencana Kerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Rencana kinerja juga merupakan suatu komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam waktu satu tahun. Rincian rencana kerja Palinfo tahun 2023 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2023

WA.3868	**Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik**	**Output**	**14.995.800.000**
3868.EBA.963	**Layanan Data dan Informasi**	**1 Layanan**	**5.230.000.000**
051	Pengelolaan Infrastruktur TIK Terintegrasi		876.616.000

052	Pemuktahuran Data dan sistem informasi		815.048.000
053	Pengelolaan Sistem manajemen TIK		479.100.000
064	Implementasi SPBE		289.236.000
055	Layanan Keterbukaan Informasi		214.150.000
056	Media Monitoring		245.500.000
057	Penyusunan Bahan Diseminasi dan Informasi Publik		666.386.000
058	Pengelolaan Perpustakaan		250.375.000
059	Pelaksanaan Edukasi Publik		662.789.000
060	Dialog Nasional Kelembagaan		500.000.000
061	Layanan Penerjemahan		221.000.000
3868.EBA. 994	**Layanan Perkantoran**	**1 Layanan**	**6.850.000.000**
3868.EBD.001	**Layanan Analisis dan Pengkajian**	**27 Dokumen**	**2.120.000.000**
051	Dokumen Hasil Kajian Lembaga		555.000.000
052	Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi		715..000.000
053	Analisis Putusan		850.000.000
3868.EBD.002	**Fasilitasi Fungsional Penata Kehakiman**	**3 Dokumen**	**680.000.000**

051	Layanan Manajeman Fungsional Penata Kehakiman		680.000.000
3868EBD.953	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**	**15 Dokumen**	**115.800.000**

BAB III

Akuntabilitas Kinerja & Keuangan

A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Palinfo pada tahun 2023 telah mencapai target sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Perbandingan Target dengan Capaian Kinerja Palinfo

Tahun 2021 s.d 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	1.Pengembangan aplikasi yang terintegrasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%
		2. Persentase pemutakhiran data dan informasi	50%	50%	100%	60%	60%	100%	70%	76,12%	108,74%
2	Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001	ISO 27001	100%	ISO 27001	ISO 27001	100%	ISO 27001	ISO 27001	100%
3	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%	3 rekomendasi	3 rekomendasi	100%
4	Meningkatnya efektifias komunikasi publik melalui media	1. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)	Menuju informatif	Informatif	106,13%	Menuju informatif	Menuju informatif	100%	Menuju informatif	Informatif	125%

	maupun langsung	2. Kategori publisitas positif media monitoring	Kategori positif	Positif	100%	Kategori positif	positif	100%	Kategori positif	Kategori Positif	100%
5	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	1. Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	15%	17%	113,33%	15%	16,68%	111,33 %	15%	15,46%	103,06%
		2. Laporan pengelolaan perpustakaan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
		3. Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial	45.000	45.000	100%	45.000	45.000	100%	45.000	45	100%
6	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas	Puas	100%	Puas	Puas	100%	Puas	Puas	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 10 indikator kinerja yang mendukung 6 sasaran kegiatan telah berhasil mencapai target dengan sangat baik. Berikut uraian terhadap pencapaian kinerja sebagaimana tersebut di atas:

1. ***Meningkatnya Layanan Pengembangan TIK yang Terintegrasi***

   a. Pengembangan Aplikasi yang Terintegrasi

   Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Bidang Data dan Layanan Informasi merujuk kepada Cetak Biru TIK 2020-2024. Dari rekomendasi Cetak Biru TIK tersebut ada target pengembangan aplikasi. Pada tahun 2023 salah satu syarat penggunaan anggaran TIK diperlukan rekomendasi *clearance* dari Kementerian PANRB dan Kominfo. Proses clearance yang telah dimulai sejak Semester I 2023 belum membuahkan hasil dikarenakan ada kendala selama proses pengajuan *clearance*. Sebelum proses pengajuan, Komisi Yudisial telah melakukan konsultasi dengan Kementerian PANRB lalu dilanjutkan dengan penyiapan TOR dan KAK sebagai salah syarat pengajuan. Namun pengajuan yang disampaikan Komisi Yudisial tidak dapat dilanjutkan karena dalam aplikasi EGA SPBE belum tersedia RO dan KRO terkait pengembangan TIK. Perubahan RO dan KRO memerlukan persetujuan Bappenas dan DJA. Komisi Yudisial telah melakukan konsultasi dengan Bappenas dan DJA. Karena keterbatasan waktu perubahan RO dan KRO baru selesai pada bulan September 2023, perubahan RO dan KRO tersebut belum melalui proses revisi. Dari waktu yang tersedia akhirnya untuk pelaksanaan pengembangan aplikasi tiga aplikasi melalui proses *clearance* tidak dilaksanakan pada tahun 2023.

   Namun, sebagai komitmen pemenuhan capaian output Pusat Analisis dan Layanan Informasi ada 3 kegiatan pengembangan aplikasi yang dijadikan output sebagai pemenuhan target kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Ketiga kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Pengembangan Aplikasi Pelaporan Online (SI-PLM Publik)**

Penguatan modul aplikasi Pelaporan online untuk mengoptimalkan informasi dan layanan pelaporan perilaku hakim secara online baik sehingga meningkatkan peran serta publik dalam mendukung wewenang dan tugas Komisi Yudisial melakukan pengawasan perilaku hakim. Masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan informasi seputar pelaporan perilaku hakim.

Pelaporan Online Perilaku Hakim adalah sistem informasi pelaporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim berbasis web yang yang berisi informasi tentang tata cara pelaporan, persyaratan laporan, peraturan terkait dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang menjadi pedoman bagi hakim dalam berperilaku di dalam dan di luar kedinasan, alur penanganan laporan dan menu layanan pelaporan online perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH.

Adapun layanan yang telah dilakukan optimalisasi dari sisi *enduser* adalah

1. Infomasi seputar tata cara penyampaian laporan masyarakat secara langsung ataupun secara online, peraturan terkait dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), alur penanganan laporan masyarakat, dalam bentuk infografis atapun tertulis.

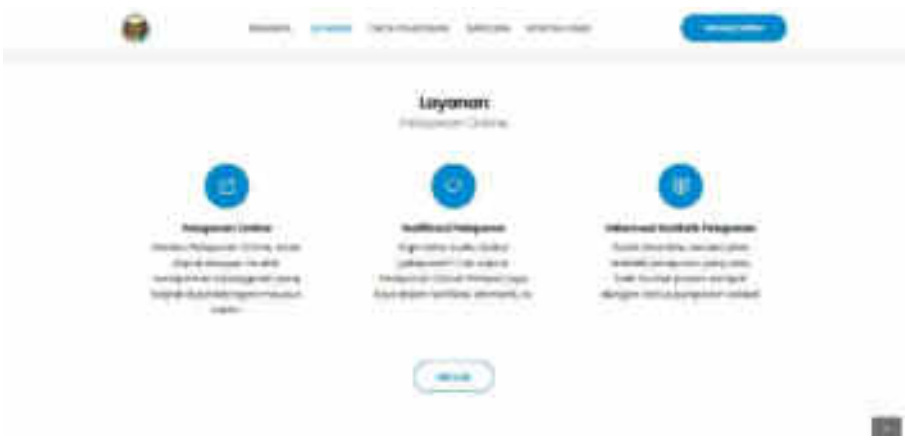

Gambar 3.1

keterangannya adalah Tampilan menu Layanan pada laman Pelaporan Online

2. Fasilitas Lacak/Penelusuran untuk mengetahui secara langsung melalui media online yang dapat diakses langsung sampai dimana proses penanganan laporan masyarakat yang telah disampaikan masyarakat

Gambar 3.2

eterangannya adalah Tampilan menu Beranda pada laman Pelaporan Online

3. Notifikasi Layanan pelaporan perilaku hakim secara langsung dan riil time melalui media online yang dapat diakses langsung oleh Masyarakat

Dan optimalisasi yang telah dilakukan dari sisi *backend* adalah

1. Melakukan pembuatan staging environment sistem pelaporan online, yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses development dan backup aplikasi dari kacamata programmer.
2. Pengintegrasian data master dari aplikasi pelaporan online (SI-PLM Publik) ke aplikasi transaksional SI-PLM

Gambar 3.3

keterangannya adalah Tampilan menu Beranda pada Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM)

Tantangan dan Strategi

Untuk pekerjaan yang akan dilakukan di tahap berikutnya adalah

1. Pengembangan indept modul rekaptulasi data statistik laporan berdasarkan banyak kategori yang lebih *advance*, utk keperluan data laporan kinerja mingguan, bulanan kepada pimpinan/ komisioner dan publik(masyarakat)
2. Pengembangan halaman backend penghubung utk aplikasi si-plm, untuk memudahkan penghubung dalam hal melihat rekaptulasi laporan kinerja masing2 penghubung khususnya terkait penanganan laporan masyarakat.

Dalam proses pengembangan SIPLM terdapat satu kendala utama yang dihadapi. Salah Satunya Pengembangan SIPLM dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan KY tentang Penanganan Laporan Masyarakat yang lama. Sementara, peraturan tersebut saat ini tengah dilakukan revisi. Dengan kondisi tersebut diharapkan Peraturan KY tentang Penanganan Laporan Masyarakat hasil revisi mempertimbangkan kondisi aplikasi yang tersedia. Dengan demikian, perubahan peraturan tersebut nantinya tidak mengubah aplikasi secara. Adapun kendala – kendala lainnya adalah

1. Pemisahan Bisnis Proses Penanganan Laporan yang bersifat pemantauan dan pengaduan laporan masyarakat langsung .
2. Perubahan pola pikir *user* dalam implementasi karena minimnya dukungan kebijakan dari pimpinan untuk mengawal penguatan dan pemeliharaan serta terhadap Aplikasi SI – PLM.
3. Dukungan anggaran yang minim dan terpisah di masing – masing biro untuk mengoptimalkan salah satu Aplikasi *Core Bussiness* Komisi Yudisial yaitu Aplikasi SI - PLM

2) Pengembangan Aplikasi Sijakim

Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim (SIJAKIM) adalah Aplikasi yang dapat memotret hakim dari segi data yang di miliki oleh Komisi Yudisial bertujuan untuk memudahkan melakukan pemetaan dan analisis data hakim yang berkaitan dengan tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial. Melalui aplikasi SIJAKIM ini diharapkan semua hal yang Hakim telah lakukan dan terekam datanya di Komisi Yudisial, Adapun data tersebut terdiri dari profile data, laporan terhadap

dirinya, pernah ikut dalam rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Adhoc serta pernah dilakukan investigasi terhadap hakim itu sendiri.

Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim (SIJAKIM) sangatlah mutlak dibutuhkan oleh Komisi Yudisial, karena berfungsi memudahkan melakukan Rekam Jejak Hakim yang meliputi: Data Hakim, Rekrutmen Hakim Agung dan Adhoc,Data Investigasi, Data Laporan Masyarakat dan Data Pola Mutasi Hakim Sehingga dapat mengetahui keaslian data – data hakim itu sendiri.

Sistem Rekam Jejak Hakim (SIJAKIM) tidak bisa berdiri sendiri karena memuat data master yang ada pada aplikasi tiap biro di Komisi Yudisial sehingga dibutuhkan integrasi data pada aplikasi core Komisi Yudisial.

Gambar 3.4
Salah satu tampilan aplikasi Sistem Rekam Jejak Hakim (SIJAKIM)

3) Pengembangan Aplikasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Aplikasi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah aplikasi yang diperuntukan untuk pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di Komisi Yudisial. Aplikasi ini untuk mengelola dan melakukan otomatisasi pengelolaan Jabatan Fungsional Penata

Kehakiman. Melalui aplikasi ini, masing-masing Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dapat melakukan pengajuan Angka Kredit dan melakukan monitoring terhadap Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

Gambar 3.5

Salah satu tampilan aplikasi SIJAPIM

Adapun fitur Aplikasi terdiri dari:

1. Halaman Beranda
2. Halaman About
3. Halaman Login
4. Halaman Monitoring Pengajuan AK
5. Halaman Dupak Dikirim
6. Halaman Daftar User
7. Halaman Dupak Dinilai

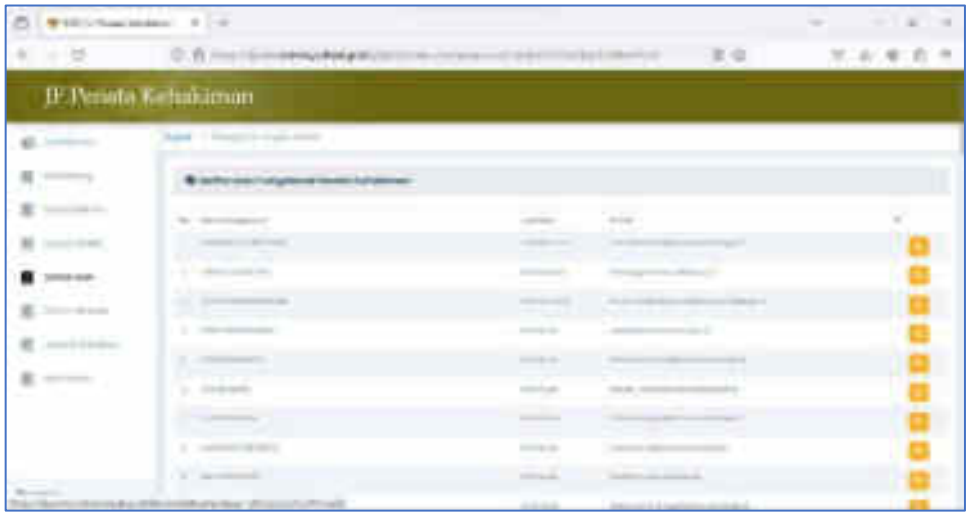

Gambar 3.6
Salah satu tampilan aplikasi SIJAPIM

Mengacu kepada uraian di atas, target pengembangan tiga aplikasi yang terintegrasi telah tercapai. Namun capaian output merupakan kegiatan yang tidak termasuk dalam skema clearance (kegiatan pengembangan aplikasi yang lain).

b. Persentase Pemutakhiran Data dan Informasi

Target untuk sasaran kegiatan persentase pemutakhiran data dan informasi adalah 70%. Pencapaian dari target tersebut dihitung berdasarkan jumlah data hakim yang dimutakhirkan dibandingkan dengan total data hakim yang dimiliki KY yang berjumlah lebih kurang 8.600. Selama tahun 2023 sebanyak 6.546 data hakim telah dimutakhirkan. Data dari Tim Promosi Mutasi (TPM) masing-masing badan peradilan menjadi sumber pemutakhiran data hakim. Adapun rincian data hakim yang telah dimutakhirkan adalah sebagai berikut:

Data Tahun 2022: 3044 data hakim
Data Tahun 2023: 3502 data hakim

Pada tahun 2022, pencapaian dari target sasaran kegiatan ini adalah 60%. Sedangkan untuk tahun 2023, melihat dari uraian di atas, capaian data yang dimutakhirkan meningkat menjadi 76,12%. Perhitungannya adalah data hakim yang dimutakhirkan dibandingkan dengan data hakim yang dimiliki KY dikalikan dengan 100%. Apabila dirumuskan dengan angka penghitungannya adalah [(6546:8600) x 100%] = 76,12%. Atas dasar tersebut, capaian kinerja untuk sasaran kegiatan ini dihitung dengan cara realisasi persentase dibagi target persentase dikali 100% atau [(76,12% : 70%) x 100%] = 108,74%.

Selain bersumber dari TPM, pemutakhiran data juga dilakukan dengan memvalidasi data seleksi calon hakim agung, data hakim yang mengikuti pelatihan KY, dan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai hasil dari kerja sama yang dilakukan dengan KY.

Adapun kendala dalam memutakhirkan data hakim dengan mengandalkan data dari TPM adalah hal tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung/waktu nyata/real time. Ditambah lagi, data yang dapat dimutakhirkan sebatas jabatan masing-masing hakim sesuai hasil TPM. Adapun data yang lain semisal riwayat pendidikan, riwayat pelatihan, dan lain-lain belum dapat dilakukan. Untuk menjawab permasalahan mendasar ini, integrasi data hakim antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sangat diharapkan dapat segera terwujud.

2. **Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif**

   Kegiatan ini merupakan implementasi dari penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang merujuk pada praktik terbaik ISO/IEC 27001. Selain itu, kegiatan ini merupakan komitmen KY

terhadap isu keamanan informasi yang mencakup aspek *confidentiality, integrity,* dan *availability* (CIA). Komisi Yudisial telah memulai implementasi ISO/IEC 27001 dengan tersertifikasi pertama kali pada tahun 2017.
Dari siklus pelaksanaan seetifikasi ISO

/IEC 27001 ini, pada tahun 2023 telah sampai pada siklus Recertifikasi. Seiring perkembangan best practice sejak tahun 2022 standar ISO/IEC 27001 melakukan upgrade dari yang sebelumnya ISO/IEC 27001:2013 menjadi ISO/IEC 27001:2022.

Gambar 3.7
Audit *Summary* Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 Tahun 2023 Komisi Yudisial

Berdasarkan ringkasan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi eksternal, KY dinyatakan berhak untuk memperoleh sertifikat ISO 27001:2022 dengan ruang lingkup data center, help desk, pengelolaan aplikasi, dan infrastruktur di Bidang Data dan Layanan Informasi. Dengan hasil tersebut, target dari indikator kinerja sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi tercapai 100%. Apabila dibandingkan, hasil audit SMKI tahun 2022 dengan tiga temuan minor, sedangkan hasil audit SMKI tahun 2023 dengan 2 temuan minor.

Adapun temuan tersebut adalah User Access Matrix untuk aplikasi pelaporan masyarakat (PLM) dan Halaman masuk/ login pada aplikasi pelaporan masyarakat https://pelaporan.komisiyudisial.go.id/ belum memiliki kendali masuk yang aman.

Dari dua temuan minor yang menjadi catatan audit telah ditindaklanjuti oleh tim SMKI dengan menyerahkan Corrective Action Plan (CAP) kepada auditor (lembaga sertifikasi eksternal).

Gambar 3.8
Sekretaris Jenderal KY Bersama Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi dan Tim SMKI Mendampingi Auditor Internal Saat Melakukan Audit di *Disaster Recovery Center* Komisi Yudisial

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Bidang Data dan Layanan Informasi pada tahun 2023 dalam mengimplementasikan SMKI adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Komisi Yudisial Tahun 2023.

b. Menyiapkan dokumen kebijakan dan prosedur sesuai standar ISO 27001:2022.

c. Sosialisasi dokumen dan *awareness* SMKI.

d. Evaluasi dan monitoring implementasi SMKI.

e. Audit internal.

f. Tinjauan manajemen.

g. Audit sertifikasi SMKI (1-2 November 2023).

CBQA GLOBAL
WE INSPIRE IN TRUST

CERTIFICATE OF REGISTRATION

ISO/IEC 27001:2022

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS

This is to certify, that:

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jalan Kramat Raya No.57, RT.09 / RW.08, Kec. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat - 10450

Scope of Certification

The provision of Information Security Management Systems of Data Center, Help Desk, Application and Infrastructure Operation at Data and Information Services

This is in accordance with Statement of Applicability Document, Number 12/AL.2/SI.04/02/2023, Revision 5.0, Released date 13 February 2023

IAF

KAN

Yessiva, S.T., M.B.A.
President Director

Cert. Number: ISMS1001009

Initial Certification Date	: 02 February 2018
Latest Certification Date	: 22 January 2024
Issue Date	: 23 January 2024
Expired Date	: 31 January 2027

Gambar 3.9
Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 Komisi Yudisial oleh Lembaga sertifikas CBQA Global Indonesia

Gambar 3.10
Tim SMKI KY mendapingi Auditor Ekternal saat audit dan melakukan pengecekan fasilitas Data Center KY

Audit SMKI ISO 27001:2022 ini juga menunjang beberapa indikator dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dilakukan KY di tahun 2022. Namun, Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sebagai kementerian yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi, belum memberikan hasilnya.

Selain itu, sebagai wujud komitmen dalam penanganan insiden siber, KY telah menbentuk tim penanganan insiden siber atau Com*puter Security Incident Response Team* (KY-CSIRT) sejak tahun 2022. Bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi Yudisial melakukan pelatihan penanganan insiden siber seperti Cyber Drill dan penerapan Devsecops dan Vulnerability Management dalam pengelolaan risiko keamanan siber.

3. Terlaksananya penelitian dan pengkajian

Target indikator kinerja pada sasaran kegiatan terlaksananya penelitian dan pengkajian adalah tiga rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian. Pada tahun 2023, Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi berhasil menghasilkan tiga rekomendasi sebagaimana dimaksud, antara lain:

A. Kajian Kelembagaan

1. Kajian Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial telah diamanahkan oleh konstitusi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung berdasarkan Pasal 24 B ayat (1) yang berbunyi Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Amanah konstitusi tersebut kemudian diturunkan ke dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Komisi Yudisial dalam pelaksanaan amanah tersebut, telah menerbitkan Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Ketika proses seleksi telah dimulai dan hasil akhir (baik hasil akhir dari KY ataupun hasil akhir dari DPR) telah keluar, jumlah calon hakim agung yang lolos pun tidak memenuhi jumlah permintaan yang diminta oleh MA. Sejak tahun 2017 s.d 2022, jumlah pendaftar yang diterima oleh KY tidak terlalu banyak meskipun sudah dilakukan perpanjangan waktu penerimaan pendaftaran. Selain itu, jumlah peserta seleksi calon hakim agung yang dinyatakan lulus baik oleh KY dan/atau oleh DPR memang selalu berada di bawah jumlah yang diminta oleh Mahkamah Agung.

Berangkat dari hal di atas, Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial merasa perlu untuk melaksanakan kajian terkait dengan evaluasi pelaksanaan seleksi calon hakim agung. Sebagai langkah awal dari kegiatan evaluasi tersebut, pada tahun anggaran ini diputuskan untuk melaksanakan uji metode dan kuesioner dalam melakukan evaluasi tersebut. Tujuan utama dari ini adalah untuk memformulasikan metode dan alat uji yang akurat di dalam melaksanakan evaluasi tersebut. Laporan ini adalah laporan terkait dengan pengujian dan formulasi dari instrument pengumpulan data tersebut.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian terhadap instrumen evaluasi untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung yang selama ini telah dilakukan oleh Komisi Yudisial serta untuk mengetahui minat masyarakat untuk mengikuti seleksi calon hakim agung. Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK telah menyelesaikan laporan hasil dan pengujian survey kajian evaluasi pelaksanaan seleksi calon hakim agung tahun 2017 s.d 2022.
Berdasarkan rencana kerja 2023 dan anggaran tahun 2023, langkah-langkah dalam penyelenggaraan kajian ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pemetaan dan Analisa Permasalahan

Pada tahapan ini, Tim Kajian melakukan diskusi dengan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan, Bapak Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D, dan akhirnya diperoleh tema untuk melakukan kajian mengenai Seleksi Calon Hakim Agung, dengan fokus utama adalah mencari tahu minat masyarakat untuk mengikuti Seleksi Calon Hakim Agung.

Selanjutnya, dari tema tersebut Tim Kajian melakukan *brainstorming* dengan Akademisi Universitas Padjajaran, Bapak Giri Ahmad Taufik,

sebagai langkah melakukan pemetaan dan menganalisa permasalahan apakah kajian mengenai Seleksi Calon Hakim Agung relevan dan tepat untuk dilakukan.

Hasil yang diperoleh dalam tahap ini adalah, tema yang akan menjadi kajian 2023 adalah Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung periode 2017-2022, dengan fokus utama, yakni:

1. Mengetahui minat masyarakat untuk mengikuti Seleksi Calon Hakim Agung;
2. Mengetahui tingkat kepuasan dari para peserta yang telah mengikuti Seleksi Calon Hakim Agung periode 2017-2022, yang nantinya dapat menjadi sarana evaluasi bagi pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung.

b. Pelaksanaan Kajian

Pelaksanaan kajian dimulai dengan membuat proposal kajian, yang dibuat oleh Tim Kajian bersama dengan Tim Pakar yang ditunjuk. Setelah pembuatan proposal selesai, dilanjutkan dengan membuat database responden yang akan diberikan *link* untuk mengisi kuesioner. Database responden berasal dari para peserta Seleksi Calon Hakim Agung periode 2017-2022 (baik berasal dari hakim karier maupun non karier) dan juga mitra Perguruan Tinggi yang selama ini telah bekerjasama dengan Komisi Yudisial.

Untuk melakukan pengujian terhadap metodologi penelitian dan instrument kajian yang telah dipilih, maka dilakukan pengajuan relevansi pertanyaan (*face validity)* kepada para Pakar melalui penyelenggaraan *focus group discussion (*FGD) pada tanggal 22-23 September 2023 yang bertempat di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta Pusat.

Gambar 3.11
Pelaksanaan FGD 22-23 September 2023

Gambar 3.12
Pelaksanaan FGD 22-23 September 2023

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil *face validty testing* melalui *expert judgement*, pengujian validitas, dan pengujian reabilitas adalah sebagai berikut:

1) Dalam *expert judgement* disimpulkan bahwa dalam hal teknik pengumpulan data, sebaiknya penyelenggaraan dilakukan

secara tatap muka, masih terdapat beberapa pertanyaan yang multitafsir, dan analisis *Top 2 boxes score*, dimana pertanyaan digunakan dengan menggunakan model skala *likert*, dengan pernyataan kesukaan, untuk kemudian dipilih jumlah 2 jawaban teratas yang menyatakan kesukaan dari jawaban responden, hal ini terkait dengan analisis kepuasaan terhadap proses seleksi calon hakim agung.

2) Dalam hasil pengujian validitas dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam varibel kepuasaan, valid dan layak untuk digunakan mengukur variabel kepuasan. Oleh karenanya, kusioner yang digunakan sejauh dengan pernyataan kepuasaan, dapat dipertahankan. Namun demikian, pengubahan yang sifatnya permukaan seperti pengubahan rumusan pertanyaan atau penambahan pertanyaan untuk ditambahkan berdasarkan pendapat ahli, masih dapat diakomodasi.
3) Dari hasil uji reabilitas, ditemukan bahwa dua dimensi memiliki reabilitas yang rendah dan sangat rendah, terhadap keseluruhan pertanyaan di atas terutama untuk terkait dengan kepuasan, yakni dimensi pengetahuan dan dimensi biaya. Hasil ini menunjukan bahwa pengukuran untuk kedua dimensi tersebut memerlukan adanya pembaharuan instrumen, sedangkan pada dimensi-dimensi lain dapat dipertahankan untuk dilanjutkan.

Setelah mendapatkan masukan dari Tim Pakar dalam FGD dan telah dilakukan revisi untuk memperbaiki instrument kuesioner, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner tersebut disebar selama 3 minggu, yakni dari tanggal 16 Oktober s.d 10 November 2023. Responden yang mengisi dengan benar dan lengkap berjumlah 23 orang. Karena sifatnya adalah *pilot project*, maka jumlah responden berapapun

yang telah mengisi dengan benar dan lengkap, akan tetap dilakukan pengolahan data dan analisa hasil kuesioner.

Dari hasil pengolahan data dan analisa data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat beberapa hipotesis awal dari dimensi minat dan kepuasan:

a) Minat untuk mengikuti seleksi calon hakim agung rendah, hal ini dapat disebabkan oleh peran DPR di dalam proses seleksi yang melakukan seleksi ulang, sebagaimana temuan dari survey awal;
b) Secara umum, responden tidak merasa puas atas pelaksanaan seleksi calon hakim agung 2017-2022, terutama pada tahap mekanisme penentuan kelulusan tahap wawancara.

Hipotesis ini perlu diuji lebih lanjut dengan melibatkan respon yang lebih luas, pada tahap pelaksanaan survey evaluasi kepuasaan seleksi calon hakim agung.

c. Diseminasi Hasil Kajian

Diseminasi hasil kajian kelembagaan dengan tema Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung telah dilakukan pada tanggal 21 Desember 2023 melalui *zoom meeting*.

Gambar 3.13
Diseminasi Hasil Kajian 21 Desember 2023

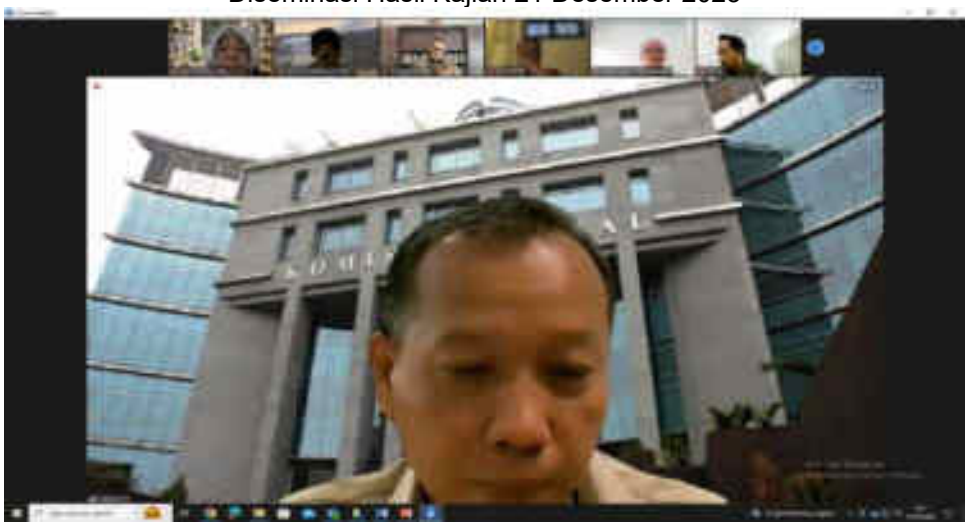

Gambar 3.14
Diseminasi Hasil Kajian 21 Desember 2023

Gambar 3.15
Diseminasi Hasil Kajian 21 Desember 2023

Gambar 3.16
Diseminasi Hasil Kajian 21 Desember 2023

2. Kajian Instrumen Analisis Putusan Sidang Pleno Komisi Yudisial tentang Pelanggaran KEPPH

Sejak berdirinya pada Agustus 2005 silam, Komisi Yudisial telah menyidangkan ratusan dugaan kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Hukuman yang dijatuhkan pun beragam, bergantung pada bentuk pelanggaran etik yang berhasil dibuktikan dalam persidangan etik. Hukuman yang selama ini kerap

diumumkan kepada publik adalah berupa rekomendasi non palu selama waktu tertentu, penurunan jabatan fungsional, sanksi ringan berupa teguran, hingga sanksi usulan pemberhentian tidak dengan hormat jika bentuk pelanggaran etik sudah tergolong sangat berat. Sayangnya, sampai hari ini, setidaknya hingga tahun 2023, kumpulan putusan pelanggaran kode etik oleh hakim ini, hanya tersimpan rapi di dalam arsip Komisi Yudisial. Belum pernah ada analisa yang cukup dalam dan memadai terhadap beragam putusan itu, baik secara keseluruhan maupun periodik setiap tahunnya. Kalaupun ada, itu hanya dalam bentuk laporan umum tahunan semata.

Padahal, keberadaan analisa terhadap kumpulan putusan sidang pelanggaran etik oleh hakim ini sangatlah penting, baik untuk internal Komisi Yudisial sendiri, Mahkamah Agung, masyarakat luas, terlebih untuk perbaikan arah pembangunan hukum Indonesia di masa depan. Sebagai contoh misalnya, *pertama,* analisa terhadap bentuk pelanggaran etik yang paling umum dan banyak terjadi dilakukan oleh hakim, dengan analisa yang memadai dapat menjadi pijakan rekomendasi terhadap Mahkamah Agung agar mengetatkan pengawasan dalam bagian tertentu yang relevan. *Kedua,* bagi Komisi Yudisial sendiri, analisa periodik yang dilakukan tidak saja bermanfaat untuk membaca peningkatan atau penurunan jumlah pelanggaran etik dalam bidang tertentu, namun dapat juga menjadi evaluasi untuk menemukan mekanisme investigasi maupun pembuktian yang lebih akurat. *Ketiga,* hasil analisis putusan yang menampilkan perguruan tinggi asal seorang hakim, dapat saja menjadi rekomendasi terhadap perbaikan atau perubahan mutu pendidikan di kampus yang bersangkutan, atau bahkan dapat saja menjadi dasar perbaikan kurikulum fakultas hukum oleh Kementerian Pendidikan. Termasuk juga rekomendasi perbaikan kurikulum pada Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung. *Ketiga,* yang tidak kalah bermanfaat dan pentingnya, kumpulan *flowchart*

pelanggaran kode etik hakim ini, bagi para akademisi dapat menjadi ladang penelitian dalam rangka mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum di masa mendatang. Dengan demikian, urgensi adanya analisa yang berkelanjutan atas putusan sidang pelanggaran etik oleh hakim ini, dapat dijelaskan dari berbagai aspek.

Pembacaan sementara terhadap beberapa Putusan Sidang Pelanggaran Etik oleh hakim menunjukkan beberapa temuan. *Pertama,* tidak ada template putusan yang baku, sehingga antara satu putusan dengan putusan yang lainnya berbeda-beda. Terutama sekali, akan sangat tampak perbedaannya antara satu periode jabatan komisioner Komisi Yudisial dengan jabatan komisioner Komisi Yudisial lainnya. *Kedua,* dari template yang berhasil di akses oleh Pusham UII, putusan sidang kode etik belum memiliki informasi data yang cukup lengkap, sehingga dapat "dibunyikan" dalam rangkaian analisis yang menarik. Informasi yang tersedia, selain beragam juga sporadis, bukan satu kesatuan yang utuh. *Ketiga,* dalam pertimbangan etik, di mana bagian ini merupakan jantung dari sebuah putusan karena memuat *ratio decidendi* seorang komisioner, yang tidak saja menggambarkan pandangan dan komitmen seorang komisioner melainkan juga sebagai pijakan akademiknya, belum terbaca dengan cukup memadai. Implikasinya, bagi seorang pembaca, akan menyiratkan keraguan atas kompetensi Komisi Yudisial dalam melakukan sidang etik.

Berangkat dari dua realitas di atas, maka penulis mengusulkan program kegiatan yang muaranya adalah pada perbaikan template putusan sidang pelanggaran kode etik dan instrumen analisis terhadap putusan sidang pelanggaran kode etik hakim. Saat ini telah disusun sebuah usulan sementara mengenai template putusan sidang pleno dan draft pemaknaan KEPPH. Kajian bersama dengan PUSHAM UII ini akan dilanjutkan di tahun 2024 dengan objek kajian yang linier.

B. Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi

Selama tahun 2023, kegiatan karakterisasi putusan berbasis aplikasi telah memilih 21 putusan dari perkara perdata, pidana, agama dan TUN. Dua puluh putusan tersebut juga dilengkapi dengan 49 putusan yang mengikuti kaidah hukum dalam yurisprudensi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran bahwa setiap yurisprudensi seharusnya diikuti oleh minimal dua putusan lain. Kelima belas putusan tersebut juga diperkaya dengan 60 anotasi yang dilakukan oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang kredibel.

Anotasi dilakukan bukan untuk menilai baik atau buruk kaidah tersebut, melainkan untuk memberikan catatan perkembangan dari kaidah hukum tersebut dari perspektif akademik yang dinamis. Ketiga langkah dalam kegiatan karakterisasi ini, sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya referensi terkait dengan putusan khususnya bagi hakim dan secara umum bagi masyarakat.

Pada kegiatan ini Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata (Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK) Kehakiman melakukan beberapa kerja sama dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penulisan anotasi putusan yurisprudensi. Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK juga melakukan konsultasi dengan beberapa pakar akademisi dari dua universitas yang memiliki pengalaman dan kompeten di bidang hukum untuk memberikan penilaian (review) terhadap anotasi putusan yurisprudensi yang dibuat. Dengan melakukan hal tersebut, hasil karakterisasi putusan yang diunggah ke dalam sistem informasi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Tabel 3.2
Data Putusan Yurisprudensi dan Putusan Pengikut Kaidah Yurisprudensi

NO	NOMOR PUTUSAN YURISPRUDENSI	NOMOR PUTUSAN PENGIKUT
1	353 K/AG/2005	Putusan No.18/Pdt.G/2020/PTA.Mtr
		Putusan No. 684/Pdt.G/2021/PA.Pbr
2	110 K/AG/2007	0945Pdt.G/2018/PA.Smd.
		1911/Pdt.G/2019/PA.Tnk
3	1/Yur/Ag/2018 (368 K/Ag/1999)	218 K/Ag/2016
		721 K/Ag/2015
4	76 K/AG/1992	276 K/Ag/2016
		217/Pdt.G/2020/PA.Pra
5	536 K/Pid/2005	Putusan No. 1992 K/Pid.Sus/2011
		Putusan No. 1957 K/Pid.Sus/2014
6	2/Yur/Pid/2018 (170 K/PID/2014)	1008 K/PID/2016
		607 K/PID/2015
7	1/Yur/Pid/2018 (908 K/Pid/2006)	692 K/Pid/2015
		1293 K/Pid/2013
8	3/Yur/Pid/2018 (1586 K/Pid/2011)	371 K/PID/2017
		1750 K/Pid/2012
		300 K/Pid./2014
		1056 K/PID/2016
9	100 K/KR/1963	Putusan No. 943 K/Pid/2016
		Putusan No. 969 K/Pid/2013
10	5/Yur/Pid/2018 (133 K/Kr/1973)	44 PK/Pid/2017
		194 K/PID/2017
		288 K/PID/2017
11	1048 K/Pdt/2012	Putusan No. 148 PDT/2016/PT KPG
		Putusan No. 1130 K/Pdt/2017
12	1/Yur/Perkons/2018 (27 K/Pdt.Sus/2013)	933 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
		78 K/Pdt.Sus-BPSK/2018
13	2/Yur/Arbt/2018 (56 PK/PDT.SUS/2011)	2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017
		105 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015
14	3/Yur/Pdt/2018 (179 K/SIP/1961)	573 K/Pdt/2017
		147 K/Pdt/2017
		1048 K/Pdt/2012
		1130 K/PDT/2017
15	4/Yur/Pdt/2018 (1051 K/Pdt/2014)	580 K/Pdt/2015
		28 K/Pdt/2016
		5 K/Pdt/2016
16	268K/SIP/1971	2270 K/Pdt/2015
		24/Pdt/2016/PT.Mks

17	154 PK/TUN/2010	Putusan No. 404 K/TUN/2016
		Putusan No. 157/G/2019/PTUN-MDN
18	3/Yur/TUN/2018 (13/B/PK/PJK/2013)	607 B/PK/PJK/2018
		604/B/PK/Pjk/2018
19	1/Yur/TUN/2018	421 K/TUN/2016
		269 K/TUN/2018
		74 K/TUN/2017
20	2/Yur/TUN/2018 (54 K/TUN/2014)	193 PK/TUN/2017
		533 K/TUN/2017
21	318K/TUN/2000	Putusan No. 41/PLW/2011/PTUN-JKT
		Putusan No. 25/PDT/2018/PT.AMB

Sepanjang tahun 2023 telah dilakukan beberapa kali diseminasi hasil karakterisasi putusan berbasis aplikasi ke berbagai perguruan tinggi dan pengadilan.

Gambar 3.17
Dokumentasi Kegiatan Diseminasi Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi di PN dan PA Larantuka

Gambar 3.18
Dokumentasi Kegiatan Diseminasi Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi di PN dan PA Larantuka

Pada tahun 2023, program karakterisasi putusan secara total mendapatkan 130 dokumen. Kegiatan karakterisasi putusan berbasis aplikasi ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1) Seluruh putusan berikut dokumen penunjangnya diunggah ke dalam sistem informasi karakterisasi putusan yang berbasis web dengan alamat karakterisasi.komisiyudisial.go.id, dan berbasis *mobile apps*;
2) Pengunggahan putusan berikut dokumen penunjangnya tersebut bertujuan agar isi dari putusan tersebut dapat tersampaikan kepada khalayak luas, khususnya para hakim, akademisi, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat sebagai referensi dalam pembuatan dan penyusunan putusan atau materi hukum lainnya.

Rekomendasi sebagaimana disebutkan di atas telah diterima. Rencananya, program karakterisasi putusan berbasis aplikasi akan dilaksanakan kembali pada tahun 2024. Hal penting yang didapat sebagai cerminan dari keberlangsungan kegiatan ini pada tahun 2023 adalah cukup tingginya jumlah pengunjung situs karakterisasi.komisiyudisial.go.id sebanyak 40.142 kali.

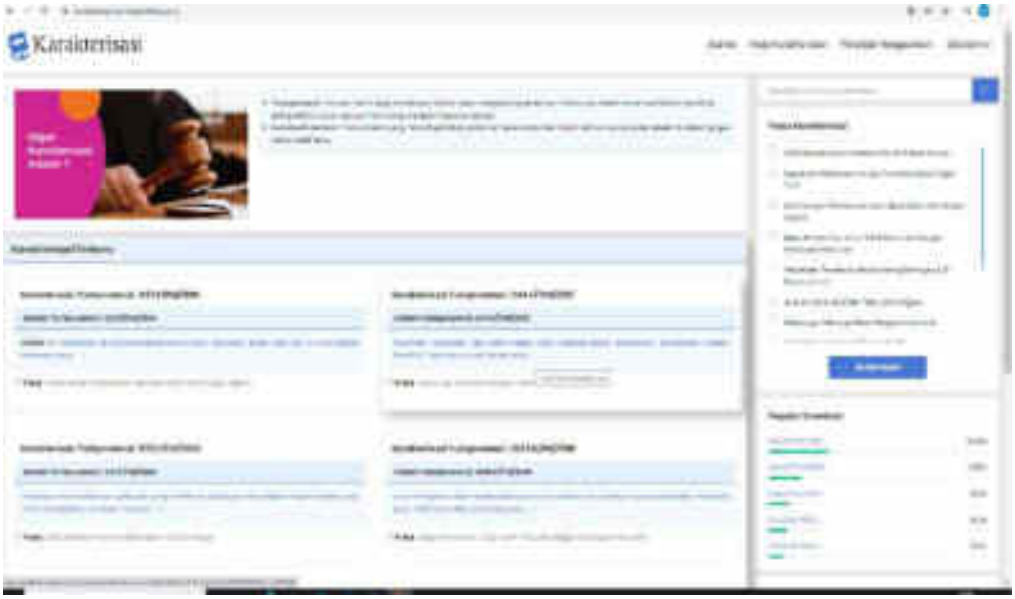

Gambar 3.19
Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan

C. Analisa Putusan

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan analisis putusan bekerja sama dengan dua perguruan tinggi, negeri dan swasta, dan dua LSM. Walaupun saat ini KY tidak terlibat dalam proses promosi-mutasi di MA, kegiatan analisis putusan ini tetap dilakukan untuk membangun pangkalan data khususnya untuk pengayaan data putusan hakim dalam rangka menjaring calon hakim agung potensial. Aspek penilaian yang digunakan dalam melakukan analisis putusan ini telah diuji sehingga memiliki cakupan yang luas dengan indikator dan metode yang ilmiah. Hal tersebut dilakukan agar hasil analisis putusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Kegiatan analisis putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dijalankan dalam tiga tahapan, yakni:

1) Pengumpulan putusan dan pemetaan mitra perguruan tinggi dan LSM.

   Mitra yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, *Institutes for Criminal Justices Reform* (ICJR), Fakultas Hukum Univeritas Tadulako, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta PUSHAM UII. Pada tahun 2023 putusan berkekuatan hukum tetap yang dianalisis oleh para mitra di atas berjumlah 50 putusan pengadilan & 30 Putusan Sidang Pleno Komisi Yudisial.

2) Pelaksanaan analisis putusan oleh mitra.

   Agar kegiatan analisis putusan sesuai dengan standar, KY menyediakan pedoman analisis putusan berupa metode dan kertas kerja yang dapat digunakan oleh para mitra. Pelaksanaan analisis putusan diawali dengan menyamakan persepsi antara KY dan mitra serta tim pakar. Proses selanjutnya adalah mengumpulkan isu sebagai bahan dalam menganalisis putusan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan reviu terhadap draf final hasil analisis putusan.

3) Diseminasi hasil analisis putusan oleh para mitra di tempat kedudukan.

   Sebagai tahap akhir dalam program analisis putusan, mitra analisis melakukan diseminasi hasil analisis putusan sebagai publikasi kepada sosialisasi kepada publik – civitas akademika hukum.

Dokumentasi Pelaksanaan analisis putusan Tahun 2023

Gambar 3.20
Penyamaan persepsi mitra analisis

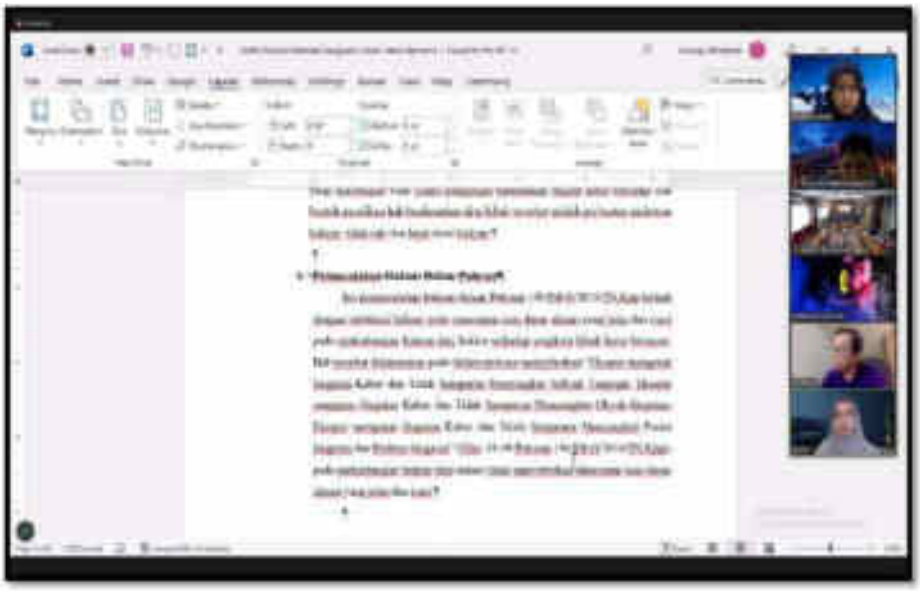

Gambar 3.21
Reviu draf hasil analisis putusan

Gambar 3.22
Diseminasi hasil analisis putusan

Gambar 3.23
Diseminasi hasil analisis putusan

Pada tahun 2023 indikator kinerja ini masih memasang target yang sama yaitu tiga rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Renstra. Oleh sebab itu upaya atau strategi untuk mencapai target yang akan

dilakukan oleh Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK di tahun 2024 akan identik dengan yang dilakukan pada tahun 2023.

Pada tahun 2023, Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK juga melakukan kegiatan penunjang di luar sasaran kegiatan yang ada dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Para pejabat fungsional analis hukum yang ada di Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK dilibatkan oleh Bagian Rekrutmen Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim untuk membuat soal kasus hukum kamar pidana, perdata, agama, TUN, TUN khusus pajak, dan HAM yang akan dipergunakan dalam seleksi kualitas calon hakim agung. Kegiatan ini dilakukan pada semester II tahun 2023.

D. Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK) merupakan jabatan fungsional tertentu yang secara khusus berada di internal KY. JFPK dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 (Permenpan RB No. 84 Tahun 2020). Munculnya JFPK kemudian diikuti dengan perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam peraturan tersebut terdapat satu struktur baru di Pusat Analisis dan Layanan Informasi yaitu Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (UPJFPK) yang berada di bawah Bidang Analisis. Dengan penambahan ini nomenklatur dari Bidang Analisis menjadi Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

1. Pengelolaan administrasi fungsional penata kehakiman

Pengelolaan administrasi fungsional penata kehakiman yang dilakukan oleh Unit Pembina di bawah pelaksanaan teknis Subbid Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di tahun 2023 berfokus kepada proses penilaian angka kredit periode penilaian Oktober - Desember 2022. Munculnya Permenpan No. 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional merubah secara signifikan mengenai proses penilaian angka kredit, dari semula konvensional berbasis kepada butir-butir kegiatan menjadi konversi angka kredit. Proses perubahan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan penilaian angka kredit periode tahun 2022 yang selambat-lambatnya harus dilaksanakan sebelum 30 Juli 2023.

Gambar 3.24
Proses penilaian daftar usulan angka kredit (DUPAK) jabatan fungsional penata kehakiman

Penilaian angka kredit periode penilaian bulan Oktober – Desember 2022 semula dijadwalkan tanggal 17 – 21 Juli kemudian dimajukan menjadi tanggal 19 – 21 Juni yang diikuti oleh 64 Fungsional Penata Kehakiman (2

Ahli Madya, 30 Ahli Muda dan 32 Ahli pertama). Dua Fungsional Penata Kehakiman tidak mengikuti penilaian angka kredit dikarenakan sedang dalam tugas belajar (1 orang ahli pertama dan 1 orang ahli muda). Penilaian Angka kredit berbasis butir kegiatan yang pertama sekaligus terakhir bagi fungsional Penata Kehakiman menggunakan media Sistem Informasi untuk memudahkan pemangku JFPK dalam mengajukan angka kredit serta tim penilai untuk memudahkan penilaian.

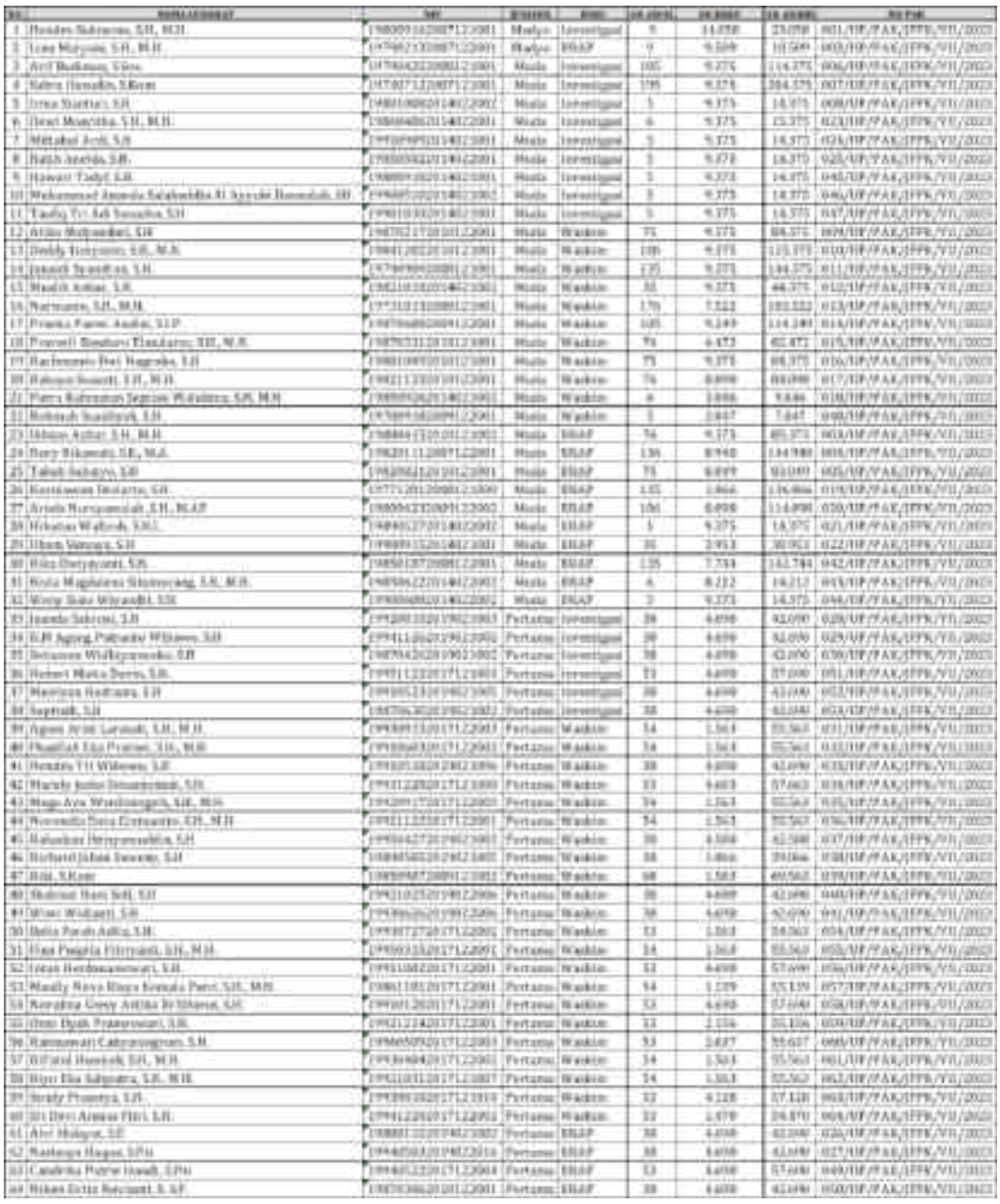

Gambar 3.25
Daftar rekapitulasi penilaian daftar usulan penilaian angka kredit (DUPAK) JF PK

2. Pengangkatan fungsional penata kehakiman

Pengangkatan fungsional penata kehakiman tahun anggaran 2024 meliputi rekrutmen dan seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja dengan hasil bergabungnya 6 pemangku fungsional penata kehakiman jenjang pertama yang meliputi 2 pegawai di Biro Investigasi, 1 pegawai di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta 3 pegawai di Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

Pengangkatan Fungsional Penata kehakiman pada awalnya juga didesain untuk kenaikan jenjang 1 pegawai ahli muda ke ahli madya melalui proses Uji Kompetensi. Proses persiapan sarana prasara Uji Kompetensi telah disiapkan melalui kolaborasi antara Unit Pembina dengan Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara (PKASN LAN). Namun, pelaksanaan Uji Kompetensi tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan peserta.

Gambar 3.26
Koordinasi Tim Unit Pembina dengan Assessment Center PPKASN LAN RI

3. Evaluasi implementasi butir kegiatan fungsional penata kehakiman

Permenpan No. 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional penata kehakiman membawa perubahan besar terhadap operasional pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional penata kehakiman. Salah satu dampak paling nyata adalah berubahnya penilaian angka kredit yang semula berbasis pada butir kegiatan menjadi berbasis konversi penilaian kinerja dengan berdasarkan ruang lingkup kegiatan. Maka dari itu, perlu adanya transformasi butir kegiatan untuk dievaluasi dan dikaji ulang menjadi ruang lingkup yang lebih sederhana namun tetap menjadi pedoman pelaksanaan tugas fungsi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Gambar 3.27
Rapat Koordinasi Pembahasan Ruang Lingkup JF Penata Kehakiman

Unit pembina telah berkolaborasi dengan perwakilan biro teknis untuk menyusun ruang lingkup yang menjadi pedoman penyusunan kontrak kerja dalam ekinerja. Ruang lingkup kegiatan fungsional penata kehakiman penting sebagai bahan awal penyusunan rencana pengembangan kompetensi dimana diperlukan analisis kebutuhan pengembangan

kompetensi yang berdasarkan proses bisnis. Ruang lingkup fungsional penata kehakiman merupakan turunan teknis dari proses bisnis sehingga dapat dijadikan bahan acuan penyusunan struktur kurikulum pelatihan. Dengan demikian, pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh unit pembina bisa selaras dengan kebutuhan praktis fungsional penata kehakiman dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

4. Pelatihan Dasar Jenjang Pertama dan Pelatihan Teknis Dasar Investigasi Jenjang Ahli Muda

Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan pelatihan masih menjadi media efektif bagi jabatan fungsional. Unit pembina telah menyelenggarakan dua pelatihan di tahun anggaran 2023, yakni pelatihan dasar fungsional penata kehakiman jenjang pertama dan pelatihan teknis dasar investigasi jenjang ahli muda.

Gambar 3.28
Pelatihan Dasar Fungsional Penata Kehakiman, 30 Oktober s.d 3 November di Pusdiklibang LAN Jatinangor

Pelatihan dasar jenjang pertama dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Oktober di Hotel Santika Bekasi dan tanggal 30 Oktober – 3 November di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administasi Negara (PKASN LAN) diikuti oleh 36 orang pemangku jabatan fungsional penata kehakiman jenjang pertama dari 3 biro teknis. Materi pelatihan berisi penjelasan detail mengenai ruang lingkup kegiatan jenjang pertama dari biro Investigasi, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Sedangkan pengajar berasal dari Tenaga Ahli, Pejabat Struktural, serta fungsional Penata Kehakiman Jenjang Muda.

Tabel 3.3
Peserta Pelatihan Dasar Penata Kehakiman Jenjang Pertama

NO.	NAMA	NIP	UNIT KERJA
1	Aditya Azhari	199208192023211000	BRAP
2	Agnes Arini Larasati	199309152017122003	Waskim
3	Alvi Hidayat	198801152019021002	BRAP
4	Asep Hamdan	198106072023211007	Investigasi
5	Belia Farah Adila	199307272017122002	Waskim
6	Candrika Putrie Irandi	199405222017122004	BRAP
7	Christina Padmi Lestari De Jesus Tavares	198701162023212009	Investigasi
8	Fhadilah Eka Pratiwi	199106032017122002	Waskim
9	Fikri Amali	199202152023211001	Waskim
10	Fina Puspita Fitriyanti	199503152017122001	Waskim
11	Hebert Matta Davin	199511222017121003	Investigasi
12	Hendro Tri Wibowo	199105182019021006	Waskim
13	Juanda Sahroni	199208102019021003	Investigasi
14	Maruly Jeska Simanjuntak	199312282017121008	Waskim
15	Maully Nova Risya Kemala Putri	198611012017122001	Waskim
16	Mega Ayu Werdiningsih	199209172017122003	Waskim
17	Meiriyan Hadinata	199105232019021005	Investigasi
18	Mulyadi Nur	198201082023211000	Waskim
19	Nastasya Haque	199405032019022016	BRAP
20	Niken Evita Novianti	198703062010122001	BRAP
21	Novalina Gresy Astika Br.Sitorus	199101282017122001	Waskim
22	Novendia Dara Cintaanito	199211222017122001	Waskim
23	Onni Dyah Prameswari	199212142017122001	Waskim

24	R.M Agung Putranto Wibowo	199411262019021002	Investigasi
25	Rahadian ihtisyamuddin	199504272019021003	Waskim
26	Rahmawati Cahyaningrum	199605092017122003	Waskim
27	Richard Johan Suweny	198905052019021005	Waskim
28	Rif'atul Husniah	199304042017122002	Waskim
29	Riki	198509072009121002	Waskim
30	Riyo Eka Sahputra	199210312017121007	Waskim
31	Sendy Prasetya	199308102017121010	Waskim
32	Shahnaz Hani Sofi	199210252019022006	Waskim
33	Sri Devi Annisa Fitri	199412202017122002	Waskim
34	Supriadi	198706302019021002	Investigasi
35	Surya Purnama	199107262023211006	Waskim
36	Wiwi Widianti	199306262019022006	Waskim

Pelatihan teknis dasar Investigasi Jenjang Muda dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 November di Hotel Santika Depok yang diikuti oleh 22 orang pemangku jabatan fungsional penata kehakiman ahli muda dari 3 biro teknis. Pelatihan teknis ini merupakan pengenalan dasar mengenai dunia investigasi yang dilihat dari berbagai instansi yang memiliki tugas fungsi terkait investigasi, diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksanaan, Kepolisian. Selain itu juga ada materi pendukung penyusunan laporan investigasi yang berkolaborasi dengan Tempo Institute serta *Open Source Intelligence* (OSINT) oleh Tim Ahli Investigasi Independen.

Gambar 3.29
Pelatihan Teknis Dasar Investigasi Fungsional Penata Kehakiman Jenjang Ahli Muda

Tabel 3.4
Daftar Peserta Pelatihan Teknis Dasar Investigasi Penata Kehakiman Jenjang Ahli Muda

NO	NAMA	NIP	BIRO
1	Tabah Sulistyo	198208212010121001	BRAP
2	Weny Sisio Wiyandri	199006082014022002	BRAP
3	Dewi Masyitha	198604062014022001	INVESTIGASI
4	Hawari Tadyf	198809182014021001	INVESTIGASI
5	Hendro Sukmono	198009162007121001	INVESTIGASI
6	Irma Sianturi	198810082014022002	INVESTIGASI
7	Miftahul Ardi	199109092014021001	INVESTIGASI
8	Muhammad Ananda Salahuddin Al Ayyubi Basmalah	199005102014021002	INVESTIGASI
9	Ratih Imelda	198505022014022001	INVESTIGASI
10	Taufiq Tri Adi Sunarko	199010302014021001	INVESTIGASI
11	Atika Nidyandari	198702172010122001	WASKIM
12	Deddy Isniyanto	198412022010121001	WASKIM
13	Hibatun Wafiroh	198905272014022002	WASKIM
14	Junaidi Syamfran	197909092008121001	WASKIM

15	Muslih Anhar	198210102014021002	WASKIM
16	Prasita Purwi Andini	198706082009122001	WASKIM
17	Praverli Bandoro Elmularso	198703312010121001	WASKIM
18	Putra Rahmatan Septian Walulima	198509262014021002	WASKIM
19	Rachmanto Dwi Nugroho	198810092010121001	WASKIM
20	Rahayu Susanti	198211232010122001	WASKIM
21	Rista Magdalena Situmorang	198506222014022002	WASKIM
22	Rohmah Suaidiyah	197809182009122001	WASKIM

4. Meningkatnya ektifias komunikasi publik melalui media maupun langsung

a. Layanan Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran kegiatan keempat dari Palinfo adalah meningkatnya efektivitas komunikasi publik melalui media maupun langsung. Salah satu target indikator kinerja yang harus dicapai Palinfo dalam sasaran kegiatan ini adalah predikat “Menuju Informatif” dari Komisi Informasi Pusat terhadap pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di tahun 2023. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Yudisial. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengamanatkan pembentukan PPID untuk bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Wujud dukungan KY terhadap keterbukaan informasi publik adalah menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. Dalam perjalanannya, peraturan tersebut mengandung banyak kekurangan dan belum dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan informasi kepada publik. Peraturan tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Peraturan tersebut saat ini menjadi payung hukum kegiatan pelayanan informasi publik di KY.

Dalam mendukung wewenang dan tugas PPID Komisi Yudisial, maka telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 89 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Yudisial Tahun

2023 (dapat diunduh di https://ppid.komisiyudisial.go.id/download_file?path=informasi_publik/8fuvZ8sJn4vVUQaBUsLMczWwBqUob5Zz0uwdQqSk.pdf&name=89_SK_Daftar_Informasi_Publik_Komisi_Yudisial_Tahun_2023_reviu_kabag_140623_acc-2_sign_sign_sign_sign.pdf)

Pelayanan informasi publik merupakan kegiatan rutin. Masyarakat dapat mengakses layanan ini secara langsung ataupun daring melalui situs www.ppid.komisiyudisial.go.id, yang ramah pengguna. PPID KY pada tahun 2023 menerima tiga permohonan informasi. Jenis informasi yang diminta tidak seluruhnya dapat diberikan karena menyangkut informasi pribadi dan tidak di bawah penguasaan KY. PPID KY berusaha menjawab atau merespons permohonan informasi berupa pemberitahuan tertulis sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak permohonan diterima, sesuai dengan standar pelayanan publik.

Tabel 3.5
Rekapitulasi Laporan Pelayanan Informasi PPID KYRI
1 Januari – 31 Desember 2023

BULAN	PERMOHONAN INFORMASI	DIKABULKAN SEBAGIAN	DIKABULKAN SELURUHNYA	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN	WAKTU PENYELESAIAN
JANUARI	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0
MARET	0	0	0	0	0	0
APRIL	0	0	0	0	0	0
MEI	0	0	0	0	0	0
JUNI	0	0	0	0	0	0
JULI	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	1	0	0	1	Bukan kewenangan KY	3 hari
SEPTEMBER	0	0	0	1	Bukan kewenangan KY	2 hari
OKTOBER	1	0	0	0	0	0
NOVEMBER	1	0	1	0	0	1 hari

DESEMBER	0	0	0	0	0	0

Sebagai wujud akuntabillitas, PPID KY juga melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik Tahun 2023, konten informasi publik di situs KY www.komisiyudisial.go.id dan situs PPID KY www.ppid.komisiyudisial.go.id. Informasi yang dimutakhirkan adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui situs KY, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data atau informasi tentang wewenang dan tugas KY, laporan keuangan KY, rencana kerja dan anggaran, DIPA, laporan kinerja KY, informasi pengadaan, dan peraturan. Selain melalui situs, informasi juga disajikan melalui media sosial KY yaitu facebook (@komisiyudisialri), twitter (@komisiyudisial), dan instagram (@komisiyudisialri).

KY terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik melalui berbagai media. Salah satunya adalah melakukan pemutakhiran aplikasi PPID online yang lebih dinamis dan responsif. Dari sisi engine aplikasi dilakukan pemutakhiran dengan framework terbaru. Terkait informasi dan data yang disajikan juga sudah dilakukan pemutakhiran dan penyesuaian tampilan untuk masing-masing informasi. Untuk aksesibiltas dan tampilan, aplikasi PPID online sudah dilengkapi dengan fitur ramah difabel (web accessibility). Inovasi ini memungkinkan akses informasi pada situs PPID dan layanan permohonan daring bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Fitur ramah difabel yang ada di aplikasi PPID online adalah responsive voice, text to speech, perbesar/perkecil teks, warna abu-abu, kontras tinggi, kontras negatif, latar belakang terang, garis bawah teks, dan ukuran huruf yang mudah terbaca.

Gambar 3.30
Ruang Pelayanan Informasi Publik Komisi Yudisial

Selain itu, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, aplikasi PPID online juga dilengkapi dengan fitur chatbot yang terkoneksi dengan WhatsApp resmi KY. Dengan fitur tersebut masyakat dapat dengan mudah mengakses layanan PPID KY.

Pada tahun 2023, Komisi Yudisial (KY) kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 91,69 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP), Selasa (19/12) di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta. Diraihnya predikat informatif tersebut menjadikan indikator kinerja ini melampaui target yang ditetapkan yaitu predikat “Menuju Informatif”, sehingga persentase pencapaian target untuk indikator kinerja ini adalah 125 %. Persentase ini didapat dengan cara formulasi capaian menggunakan pembobotan kategori sebagai berikut: Informatif (Bobot 5); Menuju Informatif (Bobot 4); Cukup Informatif (Bobot 3); Kurang Informatif (Bobot 2); Tidak Informatif (Bobot 1). Sehingga, capaian dapat dihitung dengan rumus hitung: [(Bobot Realisasi : Bobot Target) x 100%] atau [(5 : 4) x 100%] = 125%

Gambar 3.31
Hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Yudisial di laman e-monev.komisiinformasi.go.id.

Gambar 3.32
Dokumentasi penerimaan penghargaan Komisi Informasi Publik kategori "informatif"

Gambar 3.33
Piagam penghargaan KOMINFO kepada Komisi Yudisial sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif tahun 2023

b. Kategori Publisitas Positif Melalui Media Monitoring

Untuk sasaran kegiatan meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung, Palinfo memiliki indikator kinerja kedua yang harus dipenuhi, yaitu kategori publisitas positif KY melalui pengelolaan media massa. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan siaran pers, penyelenggaraan konferensi pers, media briefing, dan media monitoring.

Untuk mengetahui sejauh mana hasil publikasi KY, maka perlu dilakukan media monitoring baik untuk media massa cetak, daring, ataupun media sosial melalui insight social media. Media monitoring adalah kegiatan pengumpulan data dari berbagai saluran media untuk dianalisis dan diidentifikasi. Proses ini meliputi membaca, menonton, mencatat sampai mendengarkan sebuah konten editorial yang merupakan sumber media. Proses pemantauan akan menghasilkan suatu informasi tentang reputasi KY di mata media cetak dan daring termasuk media sosial. Monitoring media ini dapat dijadikan acuan bagi

lembaga dalam membuat dan menentukan sebuah kebijakan yang tepat.

Sebelum mengetahui sejauh mana hasil publikasi yang diterima, Palinfo perlu melakukan pengelolaan media massa dan media sosial. Palinfo menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin media. Pada tahun 2023, Palinfo membina hubungan dengan 32 media massa untuk mencapai reputasi positif lembaga. Sementara itu, untuk pengelolaan media sosial dilakukan melalui Instagram @komisiyudisialri, Facebook @KomisiYudisial, X @KomisiYudisal, dan YouTube @KomisiYudisial.

1) Pengelolaan Media Massa

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, KY membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat termasuk media massa. Pengelolaan media massa merupakan kegiatan rutin Palinfo yang dilakukan terutama oleh pranata humas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan informasi kepada wartawan seperti memenuhi kebutuhan data terkait capaian kinerja KY, memenuhi permohonan wawancara dalam hal ini melalui Juru Bicara KY, pelaksanaan konferensi pers, penyebaran siaran pers, media briefing terkait isu tertentu, media gathering untuk meningkatkan sinergi antara KY dan media massa, dan evaluasi pengelolaan media massa melalui diskusi dengan perwakilan media massa.

Tabel 3.6
Rekapitulasi Kegiatan Pengelolaan Media Massa Tahun 2023

No	Hari, tanggal	Judul	Keterangan
1	Rabu, 11 Januari 2023	Nomor: 01/Siaran Pers/AL/LI.04.01/01/2023 tentang KY Apresiasi Pemuatan Lengkap Amar Putusan Melalui	Tidak ada konferensi pers, hanya penyebaran siaran pers

		Direktori Putusan MA https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/274/ky-apresiasi-pemuatan-lengkap-amar-putusan-melalui-direktori-putusan-ma	
2	Jumat, 27 Januari 2023	Nomor: 02/Siaran Pers/AL/LI.04.01/01/2023 tentang KY Loloskan 17 Calon Hakim Agung dan ad hoc HAM di MA Menuju Wawancara https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/275/ky-loloskan-calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-ham-di-ma-menuju-wawancara	Diselenggarakan konferensi pers dengan narasumber Anggota KY Dr. Siti Nurdjanah SH MHum
3	Selasa, 31 Januari 2023	Nomor: 03/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/01/2023 tentang KY Wawancara 17 Calon Hakim Agung dan ad hoc HAM di MA https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/276/ky-wawancara-calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-ham-di-ma	Mengundang media massa dalam wawancara
4	Jumat, 3 Februari 2023	Nomor: 04/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/02/2023 tentang KY Usulkan 9 Calon	Hanya penyebaran siaran pers

		Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA ke DPR https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/277/ky-usulkan-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-ke-dpr	
5	Jumat, 3 Februari 2023	Nomor: 05/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/02/2023 tentang KY-MA Putuskan Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/278/kyma-putuskan-hakim-my-diberhentikan-dengan-tidak-hormat	Hanya penyebaran siaran pers
6	Senin, 6 Februari 2023	Nomor: 06/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/02/2023 tentang KY Terima Hibah Aset untuk Kantor Penghubung KY Jawa Tengah di Semarang https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/279/ky-terima-hibah-aset-untuk-kantor-penghubung-ky-jawa-tengah-di-semarang	Hanya penyebaran siaran pers
7	Senin, 16 Februari 2023	Nomor: 07/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/02/2023 tentang Tanggapan KY terkait	Hanya penyebaran siaran pers

		Persidangan Peristiwa Kanjuruhan https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/280/tanggapan-ky-terkait-persidangan-peristiwa-kanjuruhan	
8	Jumat, 3 Maret 2023	Nomor: 08/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/03/2023 tentang KY: "Putusan PN Jakarta Pusat terkait Pemilu Kontroversial” https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/281/ky-putusan-pn-jakarta-pusat-terkait-pemilu-kontroversial	Hanya penyebaran siaran pers
9	Rabu, 12 April 2023	Nomor: 09/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/04/2023 tentang Tiga Bulan Pertama 2023, KY Terima 566 Laporan https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/282/tiga-bulan-pertama-ky-terima-laporan	Konferensi pers Penanganan Laporan Masyarakat Jan s.d Maret 2023
10	Rabu, 12 April 2023	Nomor: 10/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/04/2023 tentang KY Rekomendasikan 24 Hakim Dijatuhi Sanksi, Dua Diusulkan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat https://komisiyudisial.go.id/frontend/	Konferensi pers Penanganan Laporan Masyarakat Jan s.d Maret 2023

		pers_release_detail/283/ky-rekomendasikan-hakim-dijatuhi-sanksi-dua-diusulkan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat	
11	Senin, 8 Mei 2023	Nomor: 11/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/05/2023 tentang KY Mulai Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM Tahun 2023 https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/284/ky-mulai-buka-pendaftaran-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-tahun	Konferensi pers Pengumuman peneriman seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM Tahun 2023.
12	Jumat, 26 Mei 2023	Nomor: 12/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/05/2023 tentang H-2 Penutupan Pendaftaran, KY Terima 34 Calon Hakim Agung dan 14 Calon Hakim ad hoc HAM di MA https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/285/h-penutupan-pendaftaran-ky-terima-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma	Konferensi pers Penanganan Laporan Masyarakat Jan-Sept 2023
13	Kamis, 30 Mei 2023	Nomor: 13/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/05/2023 tentang KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di	Hanya penyebaran siaran pers

		MA https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/286/ky-perpanjang-masa-pendaftaran-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma	
14	Senin, 5 Juni 2023	Nomor: 14/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/06/2023 tentang Amzulian Rifai dan Siti Nurdjanah Terpilih Jadi Pimpinan KY Paruh Kedua Juli 2023-Desember 2025 https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/287/amzulian-rifai-dan-siti-nurdjanah-terpilih-jadi-pimpinan-ky-paruh-kedua-juli-desember	Mengundang wartawan dalam pemilihan pimpinan KY
15	Senin, 12 Juni 2023	Nomor: 15/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/06/2023 tentang 63 Calon Hakim Agung dan 21 Calon Hakim ad hoc HAM di MA Lolos Seleksi Administrasi https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/288/calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-lolos-seleksi-administrasi	Konferensi pers pengumuman seleksi administrasi
16	Rabu, 21 Juni 2023	Nomor: 16/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/06/2023 tentang Gelar Seleksi Kualitas,	Hanya penyebaran siaran pers

		KY Pastikan Proses Berlangsung Transparan dan Independen https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/289/gelar-seleksi-kualitas-ky-pastikan-proses-berlangsung-transparan-dan-independen	
17	Kamis, 13 Juli 2023	Nomor: 17/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/07/2023 tentang Penguatan Seleksi Sekretaris MA dan Peran Badan Pengawasan Diperlukan https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/290/penguatan-seleksi-sekretaris-ma-dan-peran-badan-pengawasan-diperlukan	Hanya penyebaran siaran pers
18	Kamis 13 Juli 2023	Nomor: 18/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/07/2023 tentang 40 Orang Lolos Seleksi Kualitas, KY Minta Publik Beri Informasi Rekam Jejak https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/291/orang-lolos-seleksi-kualitas-ky-minta-publik-beri-informasi-rekam-jejak	Konferensi pers pengumuman kelulusan seleksi kualitas
19	Rabu, 19 Juli 2023	Nomor: 19/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/07/2023 tentang Terlibat Narkotika, Hakim	Hanya penyebaran siaran pers

		DA Terbukti Melanggar Etik dan Diberhentikan Tidak dengan Hormat https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/292/terlibat-narkotika-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat	
20	Rabu, 9 Agustus 2023	Nomor: 20/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2023 tentang Terbukti Terima Suap, Hakim DS Diberhentikan Tidak dengan Hormat https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/293/terbukti-terima-suap-hakim-ds-diberhentikan-tidak-dengan-hormat	Hanya penyebaran siaran pers
21	Minggu, 13 Agustus 2023	Nomor: 21/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2023 tentang Peringati HUT ke-18, KY Terus Lakukan Evaluasi dan Penguatan Internal https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/294/peringati-hut-ke-ky-terus-lakukan-evaluasi-dan-penguatan-internal	Hanya penyebaran siaran pers
22	Senin, 14 Agustus 2023	Nomor: 22/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2023 tentang Presiden Joko Widodo Beri Gelar Tanda Jasa dan	Hanya penyebaran siaran pers

		Kehormatan kepada Dua Anggota KY https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/295/presiden-joko-widodo-beri-gelar-tanda-jasa-dan-kehormatan-kepada-dua-anggota-ky	
23	Senin, 21 Agustus 2023	Nomor: 23/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2023 tentang 34 Calon Hakim Agung dan 6 Calon Hakim ad hoc HAM di MA Jalani Seleksi Kesehatan dan Kepribadian https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/296/calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-jalani-seleksi-kesehatan-dan-kepribadian	Hanya penyebaran siaran pers
24	Kamis. 24 Agustus 2023	Nomor: 24/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2023 tentang Untuk Penguatan Lembaga, KY Tanda Tangani MoU dengan KPK https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/297/untuk-penguatan-lembaga-ky-tanda-tangani-mou-dengan-kpk	Mengundang MoU KY-KPK
25	Rabu, 6	Nomor: 25/SIARAN	Hanya penyebaran

	September 2023	PERS/AL/LI.04.05/09/2023 tentang Terlibat Perselingkuhan, MKH Jatuhkan Pemberhentian Tetap Hakim HB https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/298/terlibat-perselingkuhan-mkh-jatuhkan-pemberhentian-tetap-hakim-hb	siaran pers
26	Selasa, 12 September 2023	Nomor: 26/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2023 tentang KY Beri Perhatian terhadap Jaminan Keamanan Hakim dan Persidangan https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/299/ky-beri-perhatian-terhadap-jaminan-keamanan-hakim-dan-persidangan	Mengundang media massa
27	Selasa, 9 Oktober 2023	Nomor:27/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2023 tentang KY Loloskan 15 Calon Hakim Agung dan 5 ad hoc HAM di MA Menuju Wawancara pada 9 Oktober 2023. https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/300/ky-loloskan-calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-ham-di-ma-menuju-wawancara	Konferensi pers Pengumuman Seleksi Kesehatan dan Kepribadian
28	Senin, 16 Oktober 2023	Nomor: 28/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2023 tentang KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung dan ad hoc HAM di MA Tahun 2023 https://komisiyudisial.go.id/frontend/	Mengundang media massa dalam wawancara

		pers_release_detail/301/ky-gelar-seleksi-wawancara-calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-ham-di-ma-tahun	
29	Jumat, 20 Oktober 2023	Nomor: 29/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2023 tentang KY Serahkan 11 Nama Calon Hakim Agung dan ad hoc HAM di MA ke DPR https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/302/ky-serahkan-nama-calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-ham-di-ma-ke-dpr	Mengundang media massa ke DPR
30	Jumat, 3 November 2023	Nomor: 30/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2023 tentang Januari - September 2023, Komisi Yudisial Terima 1.592 Laporan https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/303/januari-september-komisi-yudisial-terima-laporan	Konferensi pers PLM Januari s.d September 2023
31	Jumat, 3 November 2023	Nomor: 31/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2023 tentang KY Usulkan 45 Hakim Dijatuhi Sanksi https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/304/ky-usulkan-hakim-dijatuhi-sanksi	Konferensi pers PLM Januari s.d September 2023
32	Rabu, 8 November 2023	Nomor: 32/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2023 tentang	Mengundang media massa dalam

		Dukung Kelancaran Pemilu, KY Tanda Tangani MoU dengan KPU https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/305/dukung-kelancaran-pemilu-ky-tanda-tangani-mou-dengan-kpu	penandatanganan MoU
33	Kamis, 16 November 2023	Nomor: 33/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2023 tentang KY Memperkuat Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/306/ky-memperkuat-pemantauan-persidangan-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum	Mengundang media massa
34	Kamis, 7 Desember 2023	Nomor: 34/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/12/2023 tentang KY Raih Predikat Sistem Merit Sangat Baik dari KASN	Hanya penyebaran siaran pers
35	Selasa, 19 Desember 2023	Nomor: 35/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/12/2023 tentang KY Raih Predikat “Informatif” pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023	Hanya penyebaran siaran pers

Gambar 3.34
Konferensi pers seleksi calon hakim agung dan ad hoc HAM tahun 2023

Pada tahun ini, KY melaksanakan media gathering bertema Konsolidasi dengan Media Massa “Sinergi Bersama Mewujudkan Peradilan Bersih” pada Jumat s.d Minggu, 4 s.d 6 Agustus 2023.

Relasi Komisi Yudisial dan media massa ini sangat penting sebagai corong dalam menyampaikan informasi terkait tugas-tugas Komisi Yudisial. Kedekatan Komisi Yudisial dan media massa perlu terus dipupuk dan dibina agar tercipta sinergi positif sesuai tanggung jawab masing-masing.

Acara ini diikuti 27 orang perwakilan media massa nasional dan lokal.

- 15 media massa berskala nasional : Jawapos.com, Republika, Harian Kompas, Kompas.com, Infopublik.id, LKBN Antara, Merdeka.com, gatra, tirto.id, beritasatu.com, detik.com, viva.co.id, teropongnews, MNC Portal Indonesia.
- 12 media massa lokal Yogyakarta, yaitu: Harian Merapi, Koran Bernas, KR Yogyakarta, RRI Yogyakarta, Harian Jogja, Suara.com, Tribun Yogya, Kedaulatan Rakyat, Radar Yogya, Media Indonesia biro Yogyakarta dan Kumparan Biro Yogyakarta.

Tabel 3.7
Jadwal Kegiatan **Sinergisitas Komisi Yudisial Dan Media Massa,** Yogyakarta, 4-6 Agustus 2023

Hari, tanggal	Waktu	Acara	Keterangan
Jumat, 4 Agustus 2023	07.00 – 08.00 WIB	Registrasi di stasiun Gambir	
	08.50 – 15.00 WIB	Estimasi perjalanan ke Yogyakarta menggunakan kereta Argo Dwipangga dari Stasiun Gambir	
	15.00 – 16.00 WIB	Perjalanan menuju Grand Keisha Hotel	
	16.00 – 18.00 WIB	Check in	
	18.00 – 19.00 WIB	Makan malam	
	19.00 – 21.30 WIB	1. Laporan Panitia 2. Pembukaan dan Keynote Speech *Sharing media session*: Sinergisitas Komisi Yudisial dan Media Massa	Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Ketua Komisi Yudisial RI Narsum: 1. Ketua KY 2. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi 3. Sekretaris Jenderal 4. Juru Bicara KY Moderator: Pranata Humas
	21.30 – selesai	Istirahat	
Sabtu, 5 Agustus 2023	07.00 – 08.00 WIB	Sarapan	
	09.00 – 12.00 WIB	Diskusi Media	1. Miko Ginting (Juru Bicara KY) 1. Tema: Kontribusi Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas

			Hakim untuk Peradilan Bersih. 2. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si (Dosen FH UII) 2. Tema: Peran KY dan Integritas Hakim di Persimpangan Jalan. 3. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M (Dosen FH UGM) 3. Tema: Penguatan Partisipasi Publik dalam Meningkatkan Integritas Hakim. Moderator: Kabid Data dan Layanan Informasi
	12.00 – 13.00 WIB 14.00 – 14.30 WIB	*Lunch* Registrasi fun trip Lava Merapi Tour	
	15.00 – 18.00 WIB	Lava Merapi Tour	
	18.00 – 19.00 WIB	Istirahat	
	19.00 – 22.00 WIB	Penutupan acara yang dilanjutkan Bbq dinner	Penutupan: Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi
Minggu, 6 Agustus 2023	07.00 – 08.00 WIB	Sarapan	
	10.30 – 11.30 WIB	Perjalanan menuju stasiun	
	12.58 – 19.40 WIB	Menuju Jakarta menggunakan Argo Semeru dari stasiun Yogyakarta	

Acara dibuka oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Prof Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. Hadir membuka acara

dan menyampaikan keynote speech adalah Ketua Komisi Yudisial Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.LM., Ph.D.

(https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15423/ky-perkuat-sinergisitas-dengan-media-massa dan https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15436/ky-terus-pantau-kasus-hakim-agung-yang-ditangani-kpk)

Gambar 3.35
Media *Gathering* yang Diikuti Puluhan Media Massa
Yogyakarta, 4 s.d 6 Agustus 2023

Gambar 3.36
Lava tour Bersama Komisi Yudisial

Selain melakukan kegiatan-kegiatan di atas, Pusat Analisis dan Layanan Informasi juga melakukan brainstorming dan kunjungan media untuk memperoleh masukan pengembangan komunikasi publik di Komisi Yudisial.

2) Pengelolaan Media Sosial

Instansi pemerintah, termasuk KY mengadopsi media sosial sebagai saluran komunikasi strategis. Salah satu sifat yang dimiliki media sosial adalah interaktif. Sifat tersebut dapat menjadikan pengguna yang pasif menjadi aktif dalam aktivitas secara daring. Interaktivitas ini menjadi faktor pendorong bagi media sosial sebagai suatu platform ideal untuk mencapai tujuan komunikasi organisasi. Teknologi media baru ini memungkinkan organisasi, termasuk organisasi pemerintah untuk membangun keterlibatan dan hubungan dengan pemangku kepentingan utama. Melalui media sosial, KY berusaha menciptakan keterlibatan dengan publik dan berupaya untuk mengelola hubungan antara organisasi dan publik.

Berdasarkan data dari masing-masing akun media sosial KY yang diakses pada Desember 2023, tercatat ada 125.117 pengikut Instagram, 26.172 pengikut Facebook, dan 73.395 pengikut X. Adapun rincian mengenai pertambahan atau pengurangan pengikut akun media sosial KY pada tahun 2022 yaitu +6000 untuk Facebook, -605 untuk X dan + 8.606 untuk Instagram.

Apabila dibandingkan antara data jumlah pengikut media sosial KY pada tahun 2022 dan 2023, dapat disimpulkan adanya kenaikan jumlah pengikut di media sosial Instagram dan Facebook. Namun, untuk X penurunan. Hal ini merupakan suatu kendala bagi tim humas KY. Penurunan performa pada platform media sosial X bisa disebabkan oleh tren X nya sendiri yang cenderung menurun dan kemungkinan lain seperti perlu pemetaan konten pilar menjadi konten turunan (penguasaan isu) yang lebih maksimal dan tepat sasaran.

Tabel 3.8
Konten Media Sosial Komisi Yudisial Tahun 2023

Bulan	Tema Media Sosial	Jumlah Konten
Januari	Peran Publik dalam Peradilan Bersih	31
Februari	Penghubung KY baru	28
Maret	Tupoksi KY	30
April	Advokasi Hakim	32
Mei	Seleksi Calon Hakim Agung	31
Juni	Anggota KY	26
Juli	Peningkatan Kapasitas Hakim	31
Agustus	Komisi Yudisial	31
September	Pemantauan Persidangan	30
Oktober	Peradilan	30
November	Penanganan Laporan Masyarakat	31

Desember	Kaleidoskop 2023	31

Tabel 3.9
Rekapitulasi *Engagement* Media Sosial Komisi Yudisial Tahun 2023

Bulan	**Facebook**		**X**		**Instagram**	
	Reach	Interaksi	*Tayangan*	*Kunjungan Profil*	*Reach*	*Interaksi*
Januari	7.591	4.003	25.800	893	182.160	8.761
Februari	4.100	1.818	17.900	5.636	199.387	7.869
Maret	7.600	4.200	21.100	3.111	158.674	2.648
April	4.700	1.400	10.900	938	176.543	7.951
Mei	5.800	3.500	12.600	1.152	145.683	6.219
Juni	5.400	3.100	8.497	439	156.005	6.435
Juli	5.000	1.400	10.800	1.036	124.583	6.105
Agustus	6.400	3.200	17.900	4.465	160.740	9.161
September	10.446	3.053	20.700	535	123.789	6.878
Oktober	7.054	2.148	11.000	337	199.272	9.485
November	6.695	3.420	6.641	317	197.650	11.187
Desember	4.173	3.420	4.922	317	123.543	5.285

Adapun strategi yang akan diambil oleh tim pengelola media sosial KY dalam menyikapi hambatan dan persoalan yang dihadapi adalah melakukan studi banding pengelolaan media sosial dengan kementerian/lembaga lain. Hal ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi pengelola media sosial KY dari K/L lain yang lebih baik dalam melakukan pengelolaan media sosial. Selain itu, pengelola media sosial KY juga perlu menambah wawasan dengan mengikuti pelatihan terkait pengelolaan media sosial serta keahlian teknis lain baik grafis ataupun videografi guna mengoptimalkan pembuatan konten. Dengan begitu, hambatan mengenai pemahaman

pengelolaan media sosial yang belum lengkap dapat diatasi sehingga kinerja pengelolaan media sosial dapat menjadi lebih efektif dan proporsional.

3) Pengelolaan Situs Web Komisi Yudisial

Sebagai etalase lembaga, maka situs web KY perlu dikelola secara profesional. Konten utama situs KY adalah berita tentang kegiatan Pimpinan, Anggota KY dan Sekretariat Jenderal KY. Jumlah total berita di situs web KY pada tahun 2023 adalah 276 berita. Situs web KY, https://www.komisiyudisial.go.id, dirancang dengan responsive web design (RWD) di mana tampilan situs secara otomatis bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan.

Situs web KY juga disajikan dalam bentuk bilingual (Indonesia-Inggris) dengan desain yang mengedepankan estetika. Situs web KY menggunakan jenis huruf tegas pada teks dan foto, infografik dan video beresolusi tinggi untuk tampilan visual yang optimal. Situs web mengambil warna bernuansa putih untuk memberikan kesan bersih sesuai dengan filosofi KY yang ingin mewujudkan peradilan bersih.

Navigasi situs web yang ditampilkan memberikan kemudahan bagi pengunjung saat mengaksesnya untuk mendapatkan informasi halaman pada masing-masing konten. Adapun komposisinya sudah menempatkan konten dengan tata letak teks, foto, infografis, video dan konten lainnya secara proporsional.

Untuk lebih mendekatkan diri kepada pengguna layanan KY, saat ini juga sudah tersedia situs web KY dalam platform Android dan iOS (KY Mobile) yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store.

Dengan mengunduh KY Mobile, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan KY dalam satu platform. Selain informasi mengenai profil kelembagaan, KY Mobile juga menyediakan akses untuk layanan pengaduan dugaan pelanggaran

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, layanan informasi publik, Jurnal KY, karakterisasi putusan, maupun produk hukum KY.

4) Monitoring Media

Sepanjang 2023, Palinfo melakukan pemantauan terhadap 1.812 pemberitaan yang terdiri dari 276 berita dari www.komisiyudisial.go.id dan 1.536 berita dari media daring eksternal. Media yang paling banyak memberitakan KY adalah kompas.com (100 berita). Infopublik.id (90 berita), dan antaranews.com (83 berita). Aktor yang paling banyak muncul dalam pemberitaan KY adalah Juru Bicara Miko Ginting dengan 369 berita. Sementara terbanyak kedua yaitu Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai dengan total 197 pemberitaan. Berdasarkan topik pemberitaan, isu tentang pengawasan hakim, kelembagaan KY dan seleksi calon hakim agung menjadi yang dominan.

Tabel 3.10

Daftar Topik Pemberitaan tentang KY Tahun 2023

No	Tugas & Wewenang KY	Jumlah
1	Advokasi Hakim	37
2	Kelembagaan KY	498
3	Pemantauan Persidangan	163
4	Pengawasan Hakim	811
5	Peningkatan Kapasitas Hakim	20
6	Peradilan	18
7	Majelis Kehormatan Hakim	6
8	Seleksi Calon Hakim Agung	259

Dari pemantauan yang dilakukan didapatkan hasil 24 berita dengan tones negatif, 1.777 berita dengan tones netral, dan 11 berita dengan tones positif. Pemberitaan dengan tones netral didominasi oleh pengumuman kegiatan seperti pembukaan seleksi calon hakim agung, pengumuman lain yang dirilis oleh KY serta kegiatan

kelembagaan internal KY sendiri. Berdasarkan total tones yang muncul tersebut, pemberitaan tentang KY di tahun 2023 ini dominan berada pada cakupan tones netral hingga positif. Merujuk kepada hasil pemantauan pemberitaan ini, dapat dikatakan bahwa kategori publisitas positif untuk pemberitaan tentang KY telah tercapai atau 100% sesuai target.

5) Penerjemahan Bahan Diseminasi Publik Komisi Yudisial

Sesuai amanat Pasal 64 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, disebutkan bahwa Bidang Data dan Layanan Informasi mempunyai salah satu fungsi penerjemahan tulisan dan/atau lisan. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik KY melalui media ataupun langsung adalah penerjemahan bahan diseminasi publik KY.

Kegiatan penerjemahan ini terutama dilakukan untuk artikel berita di situs web www.komisiyudisial.go.id. Pada tahun 2023, artikel berita di situs web Komisi Yudisial, dengan jumlah 312 artikel, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dengan rincian sebagai berikut: Januari (20 berita), Februari (32 berita), Maret (23 berita), April (7 berita), Mei (39 berita), Juni (29 berita), Juli (24 berita), Agustus (23 berita), September (21 berita), Oktober (55 berita), November (32 berita), Desember (7 berita).

Tidak hanya berita web, bahan diseminasi publik seperti naskah siaran pers resmi telah secara rutin diterjemahkan dan diunggah melalui situs web Komisi Yudisial. Pada tahun 2023, 35 naskah siaran pers telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan dipublikasikan melalui web KY.

Selain konten dinamis seperti berita dan siaran pers tersebut, ada pula konten statis web KY, yang memuat informasi terkait

kelembagaan Komisi Yudisial, seperti dasar hukum, visi misi, tujuan, wewenang dan tugas lembaga, sejarah pembentukan, keanggotaan dan profil, sasaran strategis, sekretariat jenderal, dan sebagainya. Pejabat fungsional penerjemah KY melakukan penerjemahan dan penyuntingan konten statis situs web KY tersebut, serta memperbarui terjemahan secara berkala pada tahun 2023.

Gambar 3.37
Tampilan Situs Web KY dengan Berita yang Diterjemahkan ke Bahasa Inggris

Kegiatan penerjemahan juga dilakukan untuk bahan diseminasi publik lain, seperti abstrak jurnal, *executive summary* (rangkuman eksekutif) Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023, leaflet kelembagaan, dan lain-lain. Jurnal Yudisial merupakan salah satu

bahan diseminasi publik KY yang rutin diterbitkan setiap empat bulan. Penyuntingan dan penerjemahan ke dalam bahasa Inggris dilakukan terhadap bagian abstrak dari jurnal tersebut yaitu sebanyak 7 naskah abstrak per-edisi.

Selanjutnya, pejabat fungsional penerjemah Komisi Yudisial juga melakukan penerjemahan bahan-bahan kerja dan dokumen dalam rangka persiapan kunjungan kerja pimpinan KY ke Inggris pada bulan Oktober 2023. Untuk kegiatan ini dilakukan penerjemahan kerangka acuan kegiatan dan surat-surat dinas untuk kunjungan kerja tersebut. Surat-surat dinas lainnya diantaranya adalah *minutes of meeting/*notula rapat pimpinan dengan *CEELI Institute* (*Central and Eastern European Law Initiative*), dan rapat dengan delegasi akademisi dari Univeritas Leiden.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam tugas dan fungsi penerjemahan adalah penyusunan draft titelatur dan nomenklatur kelembagaan KY dalam bahasa Inggris. Melalui kegiatan ini diharapkan tersusun standarisasi pemakaian nomenklatur dan titelatur kelembagaan KY ke dalam bahasa Inggris. Sementara secara keseluruhan hasil penerjemahan abstrak, berita, dan siaran pers kemudian disusun dalam sebuah kompilasi, berupa glosarium terminologi tertentu.

Gambar 3.38
Glossarium Terminologi Hukum

Glossarium yang telah sebagian disusun oleh penerjemah KY adalah Glosarium teks hukum. Ke depannya, glosasium terminologi lainnya dapat disusun, seperti glosarium teks jurnalistik, maupun khusus kelembagaan KY. Glossarium ini berfungsi sebagai bahan acuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan wawasan penerjemah. Glossarium tersebut dapat dikembangkan dan diperbarui secara rutin untuk dapat dipublikasikan maupun dipergunakan sebagai referensi.

Pada tahun 2023 kegiatan penerjemahan tulis juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan seminar internasional yang diorganisir oleh KY dengan judul, “Mewujudkan Independensi Peradilan Melalui Jaminan Keamanan Hakim dan Persidangan (*Preserving Judicial Independence Through Judges & Court Security*)”. Kegiatan penerjemahan tulis untuk seminar internasional tersebut yaitu penerjemahan surat-surat dinas terkait kegiatan, *Term of Reference* (ToR), paparan presentasi dari pembicara, serta sambutan/pidato pimpinan.

Pejabat fungsional penerjemah KY juga bertugas dalam kegiatan penjurubahasan/penerjemahan lisan, baik secara konsekutif maupun simultan, di antaranya dalam kegiatan penerimaan pelapor asing di Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Selain itu, penerjemahan lisan simultan atau penjurubahasaan juga dilaksanakan untuk kegiatan webinar/seminar internasional yang diselenggarakan oleh KY. Salah satunya adalah penjurubahasaan dalam kegiatan Seminar/Webinar berjudul, 'Ruang Lingkup Tugas PNS: Tipologi dan Perspektif Konstitusional', yang dilselenggarakan pada 23 Mei 2023.

Gambar 3.39
Kegiatan *simultaneous interpreting* dalam Seminar Internasional "Ruang Lingkup Tugas Pegawai Negeri: Tipologi dan Perspektif Konstitusional, tanggal 23 Mei 2023

5. Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim

a. Persentase peningkatan pemahaman peserta edukasi publik tentang Komisi Yudisial

Indikator pertama dari sasaran kegiatan ini adalah persentase peningkatan pemahaman tentang Komisi terhadap publik yang

mengikuti edukasi sebesar 15%. Pengukuran dilakukan dengan menilai pemahaman peserta tentang KY melalui pretest dan posttest saat kegiatan edukasi publik dilakukan. Kegiatan edukasi publik bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem peradilan Indonesia dan proses hukum, memberikan pemahaman nilai-nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penegakan hukum sebagai upaya peningkatan *acces to justice*.

Sepanjang 2023, Palinfo menyelenggarakan enam kali edukasi publik, yaitu:

Table 3.11
Kegiatan dan Peningkatan Pemahaman Peserta Edukasi Publik tahun 2023

Tempat	**Narasumber**	**Jumlah peserta**	**Pre test**	**Post test**	%
Badung, Bali	Bupati Badung Ketua Bidang, Kapus Palinfo, Sekda Kab Badung, dan Ketua PN Denpasar	80	61,67	71,37	15,73
Bengkulu	Gubernur, Ketua Bidang, Kapus Palinfo, Sekda Prov, dan Ketua PT Bengkulu	75	62,69	71,88	14,64

Banjarbaru	Walikota, Ketua Bidang, Kapus Palinfo, Sekda pemkot, dan Ketua PN Banjarbaru	75	71,30	82,40	15,5
Banyuwangi	Kapus Palinfo, Ketua AMAN Banyuwangim Ketua AJI dan Dosen Untag 1945 Banyuwangi	75	70,7	82,70	16,9
Aceh	Bupati, Ketua Bidang, Kapus Palinfo, Sekda Kab Aceh Besar, dan Ketua Mahkamah Syariah Jantho		73,70	84,55	14,72

Kendari	Bupati Konawe Kapus Palinfo, Sekda Kab Konawe, dan Ketua PN Konawe	80	69,67	80,34	15,31

Kegiatan edukasi publik di Badung, Bali dilakukan pada Rabu, 31 Mei 2023 di Kantor Bupati Badung, Bali. Sebanyak 80 orang peserta edukasi publik ini yang terdiri atas ASN dan tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden untuk mengukur pemahaman mereka tentang KY. Dari kegiatan tersebut didapatkan peningkatan pemahaman soal KY sebesar 15,73%.

Gambar 3.40
Edukasi publik di Badung, 31 Mei 2023

Gambar 3.41
Edukasi publik di Badung, 31 Mei 2023

Selanjutnya, edukasi publik di Bengkulu pada Kamis, 6 Juli 2023 di Kantor Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini diikuti 75 orang peserta kegiatan ini yang terdiri atas ASN, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden untuk mengukur pemahaman mereka tentang

KY. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil adanya peningkatan pemahaman soal KY sebesar 14,64%.

Gambar 3.42
Edukasi publik di Bengkulu, 6 Juli 2023

Gambar 3.43
Edukasi publik di Bengkulu, 6 Juli 2023

Edukasi publik ketiga di tahun 2023 dilakukan di Banjarbaru, 31 Agustus 2023 di Aula Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 75 orang peserta yang terdiri atas ASN, tokoh

masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil adanya peningkatan pemahaman soal KY sebesar 15,5%.

Gambar 3.44
Edukasi publik di Banjarbaru, 6 Juli 2023

Gambar 3.45
Edukasi publik di Banjarbaru, 6 Juli 2023

Edukasi publik keempat di tahun 2023 dilakukan di Banyuwangi, 5 Oktober 2023 di Sekolah Adat Osing Pesinauan di Sawah Art Space, Desa Olehsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi. Sebanyak 75 orang peserta yang terdiri atas tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil adanya peningkatan pemahaman soal KY sebesar 16,9%.

Edukasi publik kelima di tahun 2023 dilakukan di Aceh Besar, Kamis, 26 Oktober 2023 di Aula Kantor Bupati Aceh Besar. Sebanyak 75 orang peserta yang terdiri atas ASN, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil adanya peningkatan pemahaman soal KY sebesar 14,72%.

Edukasi publik keenam di tahun 2023 dilakukan di Kendari,

Sebanyak 80 orang peserta yang terdiri atas ASN, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil adanya peningkatan pemahaman soal KY sebesar 15,31%

Berdasarkan data di atas, rata-rata pemahaman publik terkait wewenang dan tugas KY dalam membangun integritas hakim adalah (15,73% + 14,64% + 15,5% + 16,9% + 14,72% + 15,31%) : 6 = 15,46%

Gambar 3.46
… Edukasi publik di Banyuwangi

Gambar 3.47
Edukasi publik di Banyuwangi

Gambar 3.48
Edukasi publik di Aceh Besar

Gambar 3.49
Edukasi publik di Aceh Besar

Gambar 3.50
Edukasi publik di Kendari

Gambar 3.51
Edukasi publik di Kendari

Merujuk pada data ini, target indikator kinerja persentase peningkatan pemahaman publik terhadap tugas dan wewenang KY tercapai sebesar 103,06%

Tabel 3.12
Daftar Pelaksanaan Audiensi Komisi Yudisial Tahun 2023

No	Universitas	Hari, tanggal	Jumlah Peserta	Narasumber dan Moderator
1	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Senin, 16 Januari 2023 Jam 14.00 WIB s/d selesai	150 orang	Juru Bicara Komisi Yudisial Miko S. Ginting dan Festy Rahma H.
2	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang	Rabu, 18 Januari 2023 9.00 WIB s/d selesai	134 orang	Juru Bicara Komisi Yudisial Miko S. Ginting dan Festy Rahma H
3	Perwakilan Aliansi Mahasiswa Indonesia Patuh Hukum	Jumat, 20 Januari 2023 10.00 WIB s/d selesai	15 orang	Dinal Fedrian Festy Rahma H.
4	Mahasiswa Magister STIH Pertiba Pangkalpinang	Senin, 20 Februari 2023 14.00 WIB s/d selesai	58 orang	Imran (Tenaga Ahli) dan Festy Rahma H.
5	Calon Hakim Militer dari Mahkamah Agung	Jumat, 12 Mei 2023 14.00 WIB s/d selesai	35 orang	Anggota KY Siti Nurdjanah dan Festy Rahma H.
6	Universitas Islam Negeri Salatiga	Selasa, 6 Juni 2023 09.00 WIB s/d selesai	141 orang	Kapus Palinfo Juma'in dan Festy Rahma Hidayati
7	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas	Selasa, 1 Agustus 2023	89 orang	Kapus Palinfo Juma'in dan Festy Rahma Hidayati

	Muhammadiyah Bengkulu	Jam 13.00 WIB s/d selesai		
8	DPP Forum Demokrasi Milenial	Rabu, 2 Agustus 2023 jam 13.00 WIB s/d selesai	8 orang	Kapus Palinfo Juma'in dan Festy Rahma Hidayati
9	Fak. Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Selasa, 22 Agustus 2023 jam 13.00 WIB s/d selesai	94 orang	Kapus Palinfo Juma'in dan Festy Rahma Hidayati
10	SMK Muhammdiyah 10 Jakarta	Rabu, 18 Oktober 2023 jam 13.00 WIB s/d selesai	18 orang	R. R. Diana Candra Hapsari dan Festy Rahma H.
11	SMP Al Whatoniyah 9 Jakarta	Rabu, 8 November 2023 jam 09.00 WIB s/d selesai	40 orang	Festy Rahma H. Noercholysh
12	Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor	Jumat, 17 November 2023 jam 09.00 WIB s/d selesai	20 orang	Binziad Kadafi (Anggota KY) dan Festy Rahma H.
13	Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Senin, 20 November 2023 jam 14.00 WIB s/d selesai	50 orang	Dinal Fedrian dan Noercholysh
14	Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta	Rabu, 29 November 2023 jam 10.00 WIB s/d selesai	14 orang	Miko S. Ginting (Juru Bicara KY) dan Noercholysh

15	Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang	Senin, 4 Desember 2023 jam 10.00 WIB s/d selesai	47 orang	Kapus Palinfo Juma'in dan Festy Rahma Hidayati
16	Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro Lampung	Senin, 11 Desember 2023 jam 10.00 WIB s/d selesai	41 orang	Dinal Fedrian dan Noercholysh

Dialog Nasional Kelembagaan

. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama terkait dengan kedudukan, wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan dalam mewujudkan peradilan bersih serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penegakan hukum sebagai upaya peningkatan *access to justice* Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh 15 Penghubung Komisi Yudisial dalam bentuk dialog tatap muka dengan publik dan penguatan jejaring dengan tema "Peran Serta Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Mewujudkan Peradilan Bersih". Adapun Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini yaitu:

1. Sosialisasi Kelembagaan
2. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar turut serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan peradilan bersih;
3. Mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama dan bersinergi mempercepat proses terciptanya peradilan bersih dan berwibawa.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggandeng Jejaring Komisi Yudisial, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat. Adapun target peserta adalah 40 orang per daerah, sehingga total yang mengikuti kegiatan Dialog Nasional Kelembagaan ada 600 orang peserta.

Berikut tabel rincian pelaksanaan Dialog Nasional Kelembagaan di tahun 2024.

Tabel 3.13
Daftar Pelaksanaan Dialog Nasional Kelembagaan Komisi Yudisial Tahun 2023

No.	Penghubung	Hari/Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Narasumber
1	Jawa Tengah	Kamis, 23 November 2023	Sanggar Paseduluran Kie Bae, Kabupaten Banyumas	1. Dosen STIT Al Hikmah Benda Banyumas 2. Pegiat Seni dan Budaya Banyumas
2	Kalimantan Barat	Senin, 20 November 2023	Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	1.Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas 2. Dosen Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
3	Lampung	Selasa, 21 November 2023	Kampung BW Pringsewu	1. Ketua DPD IKADIN Lampung 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
4	Maluku	Kamis, 16 November 2023	Aula Universitas Iqra Buru	1. Ketua Pengadilan Negeri Namlea 2. Dosen Fakultas Hukum Iqra Buru
5	Nusa Tenggara Timur	Rabu, 22 November 2023	Aula Institut Pendidikan Soe	1. Rektor Institut Pendidikan Soe 2. Ketua Forum Jejaring Peduli Peradilan Bersih
6	Papua	Rabu, 22 November 2023	Aula Terpadu IAIN Fattahul Muluk Papua	Dosen Hukum Tata Negara IAIN Fattahul Muluk Papua
7	Papua Barat	Rabu, 22 November 2023	Gedung Muhammadiyah Sorong	Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

8	Sulawesi Utara	Selasa, 21 November 2023	Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Girian	1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi 2. Ketua Assosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Utara 3. Advokat pada Kantor Law Firm MGD & Partner
9	Sumatera Utara	Selasa, 21 November 2023	Rumah Makan ayam Presto Cabe Hijau Perbaungan	1. Ketua Serikat Petani Serdang Bedagai 2. Koordinator SIKAP-Manager Program Bitra Indonesia
10	Sumatera Selatan	Selasa, 21 November 2023	Ruang Seminar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baturaja	1. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja 2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja
11	Sumatera Barat	Senin, 20 November 2023	Nagari Kapau	1. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang
12	Nusa Tenggara Barat	Sabtu, 18 November 2023	Aula Pasar Pancingan Desa Wisata Hijau Bilabante	1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram 2. Tokoh Masyarakat
13	Riau	Selasa, 14 November 2023	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusa	1. Rektor Universitas Pahlawan 2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pahlawan
14	Sulawesi Selatan	Senin, 20 November 2023	Desa Rinding Allo Kecamatan Rongkong	1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palop 2. Dewan PD Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
15	Kalimatan Timur	Selasa, 21 November 2023	Kampus Universitas Mulia, Balikpapan	1. Dosen Universitas Mulia 2. Ketua DPC Peradi Balikpapan

b. Laporan Pengelolaan Perpustakaan

Indikator kedua dari sasaran kegiatan ini yaitu adanya satu laporan pengelolaan perpustakaan. Target ini berhasil dipenuhi dengan adanya satu laporan pengelolaan perpustakaan sehingga capaiannya adalah 100%. Hasil ini menyamai pencapaian tahun 2022. Pengelolaan perpustakaan di tahun 2023 terdiri atas berbagai kegiatan antara lain pengelolaan koleksi, pengelolaan ruangan, sistem Open Public Access Catalogues (OPAC), dan Pojok Baca Komisi Yudisial. Berikut ini ringkasan kegiatan Perpustakaan Komisi Yudisial Republik Indonesia (Perpustakaan) selama tahun 2023.

- **Pengelolaan Aset Buku Perpustakaan**

  Kegiatan pengelolaan asset buku perpustakaan pada Tahun 2023 lebih kepada kegiatan penjajaran (*shelving*) koleksi ke rak buku. *Shelving* koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial merupakan kegiatan untuk mendukung penataan koleksi perpustakaan. Pengelolaan asset buku perpustakaan dilakukan dengan cara shelving koleksi perpustakaan berdasarkan urutan nomor NUP buku. Koleksi disusun secara berurutan dimulai dari Monografi 1 – Monografi 4183, dan Buku Lainnya 1 – Buku Lainnya 1776. Koleksi perpustakaan disusun berdasarkan urutan data koleksi BMN perpustakaan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pencarian Nomor NUP koleksi BMN perpustakaan.

  Shelving koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial tidak hanya berdasarkan urutan NUP, tetapi juga berdasarkan jenis koleksi. Jenis koleksi tersebut yaitu koleksi karya Komisi Yudisial dan koleksi referensi. Koleksi karya Komisi Yudisial dikumpulkan dan disusun pada satu rak khusus. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam mencari koleksi terbitan Komisi Yudisial. Alasan disusun di satu rak khusus karena pemustaka sering meminta koleksi berdasarkan terbitan Komisi Yudisial. Selain itu,

koleksi referensi juga disusun pada satu rak khusus. Hal ini juga bertujuan untuk memudahkan dalam mencari koleksi referensi di rak koleksi. Koleksi referensi dikumpulkan dalam satu rak karena jenis koleksi ini tidak boleh dipinjam sehingga memudahkan pustakawan dalam memeriksa koleksi jika terjadi kehilangan.

Gambar 3.52
Shelving & Temu Kembali Koleksi Perpustakaan

- **Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan**

Komisi Yudisial Republik Indonesia menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 105B/HP/XVI/05/2019 yang menyebutkan bahwa sebanyak 4.957 eksemplar buku senilai Rp 959.904.466,00 tidak memiliki pencatatan yang handal. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selaku pengguna barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan BMN serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Buku-buku Perpustakaan yang merupakan bagian dari aset BMN menjadi objek temuan dari tim auditor BPK sehingga perlu untuk dilaporkan sebagaimana aset temuan lainnya.

Perpustakaan Komisi Yudisial melakukan *stock opname* koleksi pada data re-inventarisasi asset BMN tahun 2022. Setelah

dilakukan *stock opname*, beberapa buku temuan BPK berhasil dilacak dan diberi labal NUP. Total temuan BPK yang semula berjumlah 4.957 eksemplar buku senilai Rp 959.904.466,00 menjadi 400 eksemplar buku senilai Rp 282.001.090,00 di tahun 2023. Buku yang menjadi temuan BPK pada tahun 2023 berkurang senilai Rp 677.903.375,00.

- **Pengelolaan Film Dokumenter / Pengembangan Koleksi Digital**

  Perpustakaan Komisi Yudisial membuat video dokumenter terkait dengan kegiatan Komisi Yudisial. Video dokumenter merupakan salah satu karya digital atau pustaka rekam yang dikelola oleh Perpustakaan Komisi Yudisial. Video pendek berdurasi 3 – 10 menit digunakan sebagai media pembelajaran serta pelestarian dokumen kegiatan di lingkup Komisi Yudisial. Video dibuat ke dalam format MP4 dan diunggah/disimpan ke dalam media youtube.

  Perpustakaan Komisi Yudisial memproduksi 4 video pada tahun 2023, yaitu:

  1. Video Hymne Komisi Yudisial RI 2023

Gambar 3.53
Qrcode Video Hymne Komisi Yudisial RI 2023

  2. Video Indonesia Raya versi Komisi Yudisial RI 2023

Gambar 3.54
Qrcode Video Indonesia Raya versi Komisi Yudisial RI 2023

3. Video Dokumenter Highlight Rapat Konsolidasi Penghubung KYRI 2023

Gambar 3.55
Qrcode Video Dokumenter Highlight Rapat Konsolidasi Penghubung KYRI 2023

4. Video Internalisasi BMN

Gambar 3.56
Qrcode Video Internalisasi BMN

- **Instalasi Aplikasi INLIS Lite**

Perpustakaan Komisi Yudisial menginstall Inlis Lite versi 3 sebagai aplikasi manajemen perpustakaan. Perpustakaan Komisi Yudisial mengadakan rapat dengan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Perpusnas untuk memberikan gambaran mengenai instalasi Inlis Lite. Rapat tersebut dihadiri oleh Tim IT Komisi Yudisial untuk membahas penerapan instalasi Inlis Lite. Hasil rapat tersebut adalah Perpustakaan Komisi Yudisial menginstal aplikasi Inlis Lite versi 3 menggunakan jaringan lokal (Local Area Network). Oleh karena itu, aplikasi Inlis Lite versi 3 Perpustakaan Komisi Yudisial belum dapat diakses secara online menggunakan jaringan di luar Komisi Yudisial.

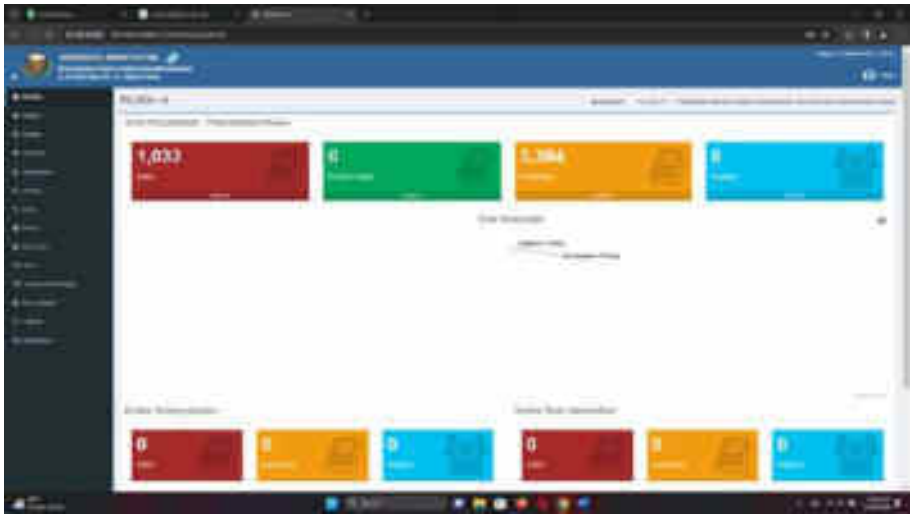

Gambar 3.57
Tampilan Beranda Aplikasi Inlis Lite Versi 3

- **Penataan Ruangan Perpustakaan**

Perpustakaan Komisi Yudisial telah merancang denah ruang perpustakaan yang baru pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Perpustakaan Komisi Yudisial mengeksekusi rancangan denah ruang perpustakaan tersebut. Perpustakaan Komisi Yudisial mengurangi jumlah rak koleksi yang semula berjumlah 18 rak menjadi 10 rak koleksi. Rak yang digunakan hanyak rak yang terbuat dari kayu, sedangkan rak yang terbuat dari besi

dipindahkan ke Gudang. Hal ini bertujuan untuk memberikan space yang lebih luas dan mengurangi beban lantai 2 gedung Komisi Yudisial.

Gambar 3.58
Ruang Diskusi Perpustakaan Komisi Yudisial

Perpustakaan Komisi Yudisial menambahkan 2 area fasilitas ruangan perpustakaan, yaitu ruang diskusi dan ruang lesehan. Ruang diskusi terdiri dari 1 meja besar dan 8 kursi yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka untuk berdiskusi maupun rapat. Ruangan ini juga menyediakan dinding polos yang dapat dimanfaatkan sebagai screen projector ketika rapat. Selain itu, pada ruang lesehan terdapat 2 meja kecil dan 6 kursi tatami. Ruangan lesehan dapat dimanfaatkan pemustaka untuk bekerja dengan nuansa santai maupun diskusi. Ruang lesehan dapat juga dimanfaatkan pemustaka sebagai sarana rekreasi perpustakaan.

Gambar 3.59
Area Lesehan Perpustakaan Komisi Yudisial

- **Inventarisasi Koleksi Hibah**

  Perpustakaan Komisi Yudisial memiliki ragam jenis koleksi berdasarkan sumber pengadaannya. Salah satu jenis pengadaan koleksi Perpustakaan adalah hibah/pemberian koleksi. Perpustakaan Komisi Yudisial memiliki koleksi hibah/pemberian dari pemustaka, baik internal maupun eksternal Komisi Yudisial. Setiap koleksi yang dihibahkan atau diterima Perpustakaan Komisi Yudisial diinventarisasi ke dalam Microsoft excel. Pendataan tersebut dilakukan untuk mengetahui judul dan jumlah eksemplar koleksi hibah/pemberian yang diterima Perpustakaan Komisi Yudisial. Berdasarkan hasil inventarisasi terdapat 570 eksemplar koleksi hibah dengan 121 judul koleksi.

  Data yang dientri adalah hari/tanggal terima, pemberi, judul, ISBN/ISSN, pengarang, tahun terbit, jenis koleksi, jumlah eksemplar, dan keterangan. Kolom keterangan diisi dengan hibah internal atau hibah eksternal. Kolom data pada inventarisasi koleksi hibah/pemberian tidak dibuat dengan lengkap seperti data pada katalog koleksi perpustakaan. Hal itu agar proses inventarisasi koleksi hibah/pemberian dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, data yang terdapat pada

inventaris koleksi hibah/pemberian dapat memudahkan proses temu kembali koleksi.

- **Layanan kepada Pemustaka**

  Layanan pemustaka adalah layanan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhannya secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk layanan pemustaka adalah layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah kegiatan untuk melayani pemustaka dalam peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian buku serta penyelesaian administrasinya. Layanan sirkulasi hanya diberikan kepada pegawai Komisi Yudisial. Pemustaka dari eksternal Komisi Yudisial tidak diperkenankan meminjam koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial.

  Pengadministrasian layanan sirkulasi Perpustakaan Komisi Yudisial pada saat ini dilakukan secara manual. Pengadministrasian layanan sirkulasi dilakukan dengan melakukan pencatatan peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian koleksi di buku tamu. Kolom data pada buku tamu terdiri dari hari, tanggal, nama pemustaka, asal institusi (internal/eksternal), keperluan, dan paraf. Pengadministrasian layanan sirkulasi ditulis secara spesifik pada kolom keperluan dengan mencatat judul dan barcode buku yang dipinjam, perpanjang, dan dikembalikan. Pada tahun 2023 tercatat ada 55 transaksi layanan sirkulasi di Perpustakaan Komisi Yudisial.

Gambar 3.60
Layanan Sirkulasi dan Pemustaka

- **Pengembangan *Universal Decimal Classification* (UDC)**

  Klasifikasi *Universal Decimal Classification* (UDC) adalah klasifikasi internasional yang biasa digunakan untuk pengelompokkan buku atau dokumen menurut subjek bidang kajian informasi yang dimuatnya. UDC adalah salah satu skema klasifikasi yang digunakan di perpustakaan, bibliografi, dokumentasi dan pelayanan informasi di lebih dari 130 negara di seluruh dunia dan diterbitkan dalam lebih dari 40 bahasa. Sistem UDC merupakan penyederhanaan dan perluasan system klasifikasi DDC yang disusun oleh British Standard Institution (BSI), dibawah pengawasan *International Federation for Documentation* (FID).

  Perpustakaan Komisi Yudisial belum mempunyai buku panduan Universal Decimal Classification (UDC) khusus milik Perpustakaan Komisi Yudisial. Perpustakaan Komisi Yudisial mengembangkan kode/notasi klasifikasi pada UDC. Komisi

Yudisial merupakan lembaga etik pada pengawasan hakim di lembaga peradilan Indonesia. Oleh sebab itu, Perpustakaan Komisi Yudisial ingin mengembangkan notasi klasifikasi UDC dengan subjek hukum dan peradilan.

- **Pojok Baca Komisi Yudisial**

  Perpustakaan Komisi Yudisial bertekad mengembangkan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi. Pengembangan minat baca dilakukan melalui program Pojok Baca Komisi Yudisial. Program ini bertujuan khusus untuk menambah pengetahuan Masyarakat tentang Komisi Yudisial dan ilmu hukum. Program Pojok Baca Komisi Yudisial juga sebagai sarana sosisalisasi kelembagaan Komisi Yudisial melalui kegiatan peningkatan literasi informasi oleh Perpustakaan Komisi Yudisial. Dengan adanya kegiatan pojok baca ini diharapkan Lembaga Komisi Yudisial dapat lebih dikenal oleh publik.

  Komisi Yudisial membuat Pojok Baca Komisi Yudisial di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Komisi Yudisial menyerahkan buku kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung berjumlah 505 judul dan 505 eksemplar. Penyerahan dilakukan secara simbolik oleh Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial kepada Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial ini menjadi koleksi pojok baca di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

Gambar 3.61
Pojok Baca Komisi Yudisial

Gambar 3.62
Sampul Muka Laporan Kegiatan Perpustakaan Komisi Yudisial Tahun 2022

- **Jumlah Cetakan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Lainnya di Bidang Yudisial**

Indikator kinerja ketiga dari sasaran kegiatan kelima adalah jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial yang berjumlah 45.000 eksemplar. Indikator ini berhasil mencapai target 100% dengan adanya 45.000 eksemplar bahan publikasi di bidang yudisial dengan rincian: 3.000 eksemplar Jurnal Yudisial, 4.500 eksemplar Majalah Komisi Yudisial, 1.000 eksemplar kalender, 300 eksemplar buku Bunga Rampai, 300 eksemplar Komik Komisi Yudisial, 500 eksemplar buku agenda, 14.400 eksemplar stiker, 12.000 eksemplar leaflet kelembagaan dan 9.000 eksemplar buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

6. Meningkatnya layanan perkantoran

Target dari indikator sasaran kegiatan ini adalah kategori “Puas” (range nilai 71-85%) para pengguna layanan perkantoran khususnya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk mengetahui tingkat kepuasan tersebut diukur dengan melakukan survei kepada para pengguna layanan pengelolaan TIK. Hasil yang diperoleh diharapkan menjadi masukan untuk melakukan perbaikan sehingga peran TIK untuk membantu pelaksanaan tugas KY semakin dirasakan para pengguna layanan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) ruang lingkup yang menjadi cakupan penilaian, yaitu:

1. Persyaratan;

2. Sistem Mekanisme Prosedur;

3. Waktu Penyelesaian;

4. Biaya/ Tarif;

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;

6. Kompetensi Pelaksana;

7. Perilaku Pelaksana;

8. Penanganan Pengaduan;

9. Sarana Prasarana;

Hasil Survei Layanan TIK

Tingkat keyakinan survei dipastikan sebesar 99% dengan tingkat kesalahan/margin error sebesar 1%. Populasi (N) survei sebesar 340 orang dengan minimum sampel responden sejumlah 189 orang yang dilakukan dengan penyeberan link kuisioner melalui WA Blast.

Hasil yang didapat dari penghitungan kuesioner secara kuantitatif didasarkan pada Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Hasil Penghitungan Kuesioner Survei Pengguna Layanan Pengelolaan TIK

UNSUR PELAYANAN	PERTANYAAN	RESPONDEN	NILAI SOAL	Σ Nilai Soal / Σ Soal Terisi	IKM UNIT PELAYANAN		MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
Persyaratan	P1	Responden 1 s.d Responden 189	693	3,7	3,61	675,5	A	Sangat Baik
	P2		650	3,5				
Sistem Mekanisme Prosedur	P3		0	0	3,50	655	B	Baik
	P4		0	0				
	P5		655	3,50				
Waktu Penyelesaian	P6		644	3,44	3,44	644	B	Baik
Biaya	P7		748	4	4	748	A	Sangat Baik

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	P8		634	3,39	3,39	634	B	Baik
Kompetensi Pelaksana	P9		666	3,51	3,51	666	B	Baik
Perilaku Pelaksana	P10		677	3,62	3,62	677	A	Sangat Baik
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	P11		0	0	3,43	642	B	Baik
	P12		642	3,43				
Sarana dan prasarana	P13		618	3,30	3,30	618	B	Baik
	P14		0	0				
	P15		0	0				
	P16		0	0				
	P17		0	0				
Nilai Indeks				**3,48**	**87,07**			
Kinerja Unit Pelayanan				**B**	**BAIK/PUAS**			

**) Nilai 0 karena jenis pertanyaan terbuka (essai)*

Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan pengelolaan TIK yang dilakukan oleh Palinfo menyatakan puas dengan layanan yang diberikan. Hal tersebut terlihat dari nilai indeks kinerja unit pelayanan pada kategori B (Baik) dengan nilai 87,07 atau bisa disamakan dengan kategori **PUAS** sebagaimana merujuk pada tabel Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi tahun 2023.

Tabel 3.15
Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Kerja Sesuai Dengan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	**1,00 – 2,5996**	**25,00 – 64,99**	**D**	**Tidak baik**
2	**2,60 – 3,064**	**65,00 – 76,60**	**C**	**Kurang baik**
3	**3,0644 – 3,532**	**76,61 – 88,30**	**B**	**Baik**
4	**3,5324 – 4,00**	**88,31 – 100,00**	**A**	**Sangat baik**

Berpedoman pada tabel di atas, dapat dilihat nilai rata-rata hasil survei pelayanan pengelolaan TIK adalah baik, bahkan ada beberapa unsur pelayanan yang dapat nilai sangat baik yaitu unsur biaya dan unsur perilaku pelaksana. Namun, Untuk unsur sarana dan prasarana yang mendapat nilai baik harus menjadi perhatian karena mendapat nilai terendah dari sembilan unsur layanan yang ada. Hal ini menjadi catatan untuk melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap sarana dan prasarana TIK yang dikelola oleh Palinfo.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, tingkat kepuasan pengelolaan layanan TIK sudah semakin baik. Pada 2022 nilai yang didapat adalah 86,95 dengan kategori B (Baik). Tahun ini nilai yang didapat menjadi 87,07 juga dengan kategori B (Baik). Nilai yang diperoleh pada tahun 2023 tidak ada nilai dengan kategori Kurang Baik atau C (Cukup) untuk masing-masing unsur layanan. Dengan demikian layanan pengelolaan TIK yang diberikan Pusat Analisis dan Layanan Informasi dipandang Baik oleh penerima manfaat.

Dari sisi layanan yang diberikan oleh Palinfo, karena berkaitan dengan pihak ketiga (provider), masalah administrasi dan proses eskalasi ketika terjadi insiden masih menjadi persoalan yang terus dilakukan evaluasi. Hal ini sudah disampaikan Bidang Data dan Layanan Informasi kepada masing-masing penyedia saat melakukan evaluasi terhadap masing-masing vendor (provider) sebelum melakukan perpanjangan atau pembaruan kontrak.

Apabila melihat realisasi indikator kinerja Palinfo sampai dengan tahun 2022 kemudian dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Palinfo 2020-2024, dapat dinyatakan bahwa Palinfo telah mencapai target jangka menengah tersebut.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang ada

di Palinfohampir semuanya atau sekitar 90% telah menduduki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kualifikasi dan profesionalitas di bidangnya. Kedua, adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu, Palinfo juga didukung oleh tim pakar yang menjalankan perannya secara profesional sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Pada tahun 2022 Palinfo mendapatkan anggaran sebesar Rp11.634.920.000. Dari jumlah tersebut anggaran yang berhasil diserap sebesar Rp11.037.757.153 atau 94,87%.

B. FAKTOR PENDUKUNG PENGHAMBAT, DAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

1. Pendukung Keberhasilan

Adapun beberapa faktor yang dirasakan sebagai pendukung bagi Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam melaksanakan capaian kinerja dan anggaran secara maksimal, antara lain:

a. SDM yang saat ini dimiliki hampir 100% sudah berada dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Analisis dan Layanan Informasi, sehingga dari sisi kualitas sudah dianggap sebagai SDM profesional di bidangnya.
b. Sarana dan prasarana kerja yang disediakan bagi SDM yang ada secara kualitas sudah memenuhi standar kerja yang ditetapkan, dan sangat mendukung pelaksanaan tugas Pusat Analisis dan Layanan Informasi.
c. Secara pendidikan, SDM yang ada di Pusat Analisis dan Layanan Informasi telah memenuhi standar yang ditentukan di bidangnya, termasuk dalam hal pengembangan SDM melalui pendidikan informalnya.
d. Untuk memenuhi kekurangan SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Analisis dan Layanan Informasi diperbantukan 1 (satu) Jasa Lainnya yang membantu

melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, serta 1 (satu) Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) dan 3 (tiga) Jasa Lainnya yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi pada Bidang Layanan, sehingga mempelancar layanan pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

2. Penghambat Keberhasilan

Adapun beberapa faktor yang dirasakan sebagai penghambat bagi Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam melaksanakan capaian kinerja dan anggaran secara maksimal, antara lain:

a. Masih terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif di Pusat Analisis dan Layanan Informasi, dimana jumlah SDM yang ada saat ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan terhadap Pusat Analisis dan Layanan Informasi serta kapasitas SDM yang diperlukan menguasai sisi perencanaan kegiatan masih sangat terbatas.
b. Kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan anggaran yang cukup menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya kebijakan “blokir anggaran” oleh kementerian keuangan yang mana membuat ketidakpastian terutama dalam hal pengusahaan upaya pembukaan kembali yang juga bukan menjadi perkara yang mudah untuk dilakukan. Selain itu, permohonan pembukaan blokir baru dibuka disaat tahun anggaran sudah menjelang akhir semester kedua, sehingga dari sisi pelaksanaan kegiatan juga sudah tidak begitu idial lagi.
c. Masih belum begitu idialnya postur anggaran yang diberikan apabila dibandingkan dengan usulan perencanaan, sehingga terkadang ada cakupan pelaksanaan kegiatan yang dirasa tidak terlaksana secara komprehensif.

3. Strategi Peningkatan Kinerja

a. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai Renstra dengan lebih mencermati sasaran dan pelaksanaan kegiatan, serta waktu pelaksanaannya sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi semakin efektif.
b. Sinkronisasi kebijakan dan program yang ditetapkan baik oleh Komisi Yudisial maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
c. Mengelola sarana prasarana dan SDM yang dimiliki dengan maksimal untuk mencapai sasaran target kinerja yang telah ditetapkan.
d. Merekrut SDM dengan status jasa lainnya untuk mengatasi kendala kekurangan jumlah SDM yang dimiliki.

C. ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI KINERJA LEVEL NASIONAL

Dari target kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi, ada beberapa capaian kinerja yang merujuk kepada capaiaan kinerja secara nasional, diantaranya:

a. Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif

Sertifikasi ISO 27001:2022

ISO/IEC 27001 berisi panduan keamanan informasi yang menjelaskan syarat-syarat untuk membuat, menerapkan, melaksanakan, memonitor, menganalisa, dan memelihara serta mendokumentasikan informasi agar tetap aman yang mencakup kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan atas informasi. Pada dasarnya SMKI ini menerapkan proses manajemen resiko pada keamanan informasi termasuk kepada orang, proses, dan sistem teknologi informasi.

Sejak 2017, Komisi Yudisial sudah mulai mengimplementasikan ISO/IEC 27001. Secara nasional belum banyak Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan. Pada tahun 2023 Komisi Yudisial melakukan upgrade standar sekaligus recertification ISO/IEC 27001:2022.

KY CSIRT

Dari bahan paparan yang disampaikan BSSN, terkait rencana pembangunan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Komisi Yudisial dalam rencana pembangunan masuk pada tahun 2023. Namun dalam realisasinya, rekomendasi dari BSSN berdasarkan hasil asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) KY CSIRT dapat diluncurkan pada tahun 2022 (satu tahun lebih cepat dari rencana BSSN)

Gambar 3.63
Peta Rencana Pembangunan CSIRT Instansi Pusat Tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh BSSN

Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dari 47 indikator ada beberapa aspek yang berkaitan dengan ISO 27001. Berikut hasil penilaian Indeks SPBE tahun 2023. berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

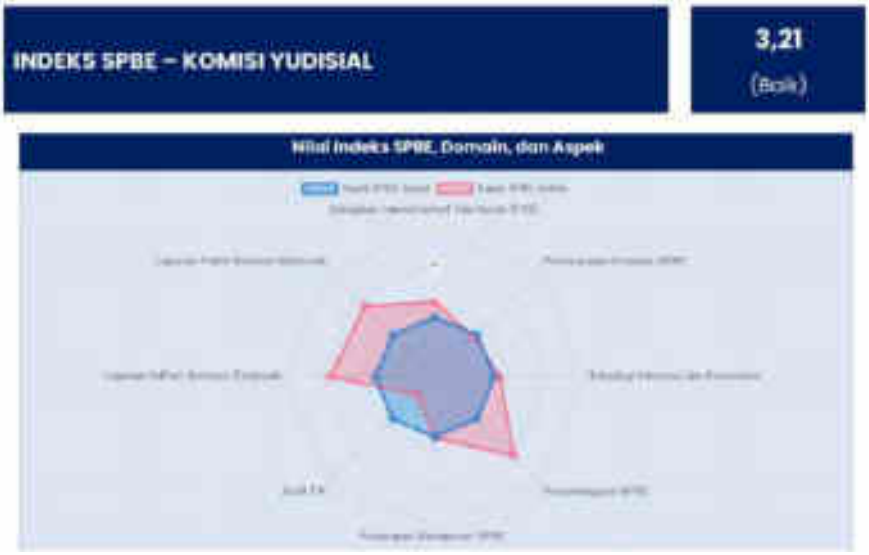

Gambar 3.64
Indeks SPBE Komisi Yudisial

Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2,93	Baik
2	Dewan Perwakilan Rakyat	3,57	Sangat Baik
3	Mahkamah Agung RI	3,19	Baik
4	Badan Pemeriksa Keuangan	3,63	Sangat Baik
5	Mahkamah Konstitusi	3,36	Baik
6	Komisi Yudisial	3,21	Baik
7	Dewan Perwakilan Daerah	2,24	Cukup

Gambar 3.65
Hasil Evaluasi SPBE 2023

Indeks Pembangunan Statistik

Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	2,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	1,70	1,86
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	2,00
Domain Kelembagaan	17%	2,60	1,85	1,94
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	2,00
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	1,78	1,96

Gambar 3.66
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Domain

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Komisi Yudisial Tahun 2023 adalah **1,96** dengan predikat "**Cukup**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sectoral di Komisi Yudisial.

b. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2023 memberikan predikat **"Informatif"** kepada KY untuk kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal keterbukaan informasi publik. KY memperoleh nilai 91,69.

LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	98,14
2	Arsip Nasional Republik Indonesia	98,02
3	Otoritas Jasa Keuangan	97,76
4	Radio Republik Indonesia	97,32
5	Sekretariat Kabinet	96,72
6	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	96,65
7	Dewan Perwakilan Rakyat	95,70
8	Mahkamah Agung	94,95
9	Bank Indonesia	94,32
10	Badan Riset dan Inovasi Nasional	93,99
11	Badan Informasi Geospasial	93,52
12	Lembaga Administrasi Negara	93,18
13	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	92,94
14	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	92,52
15	Komisi Yudisial	91,69
16	Badan Pemeriksa Keuangan	91,55
17	Badan Standardisasi Nasional	91,38
18	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	91,34
19	Badan Pusat Statistik	90,86
20	Mahkamah Konstitusi	90,24
21	Lembaga Penjamin Simpanan	90,20
22	Badan Kepegawaian Negara	90,19
23	Lembaga Ketahanan Nasional	90,13

Gambar 3.67
Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2023

Sehingga didapat capaian, dengan formulasi perhitungan

$$\frac{bobot\ realisasi}{bobot\ target} \times 100\% \text{ atau } \left(\frac{5}{4} \times 100\%\right) = \mathbf{125,00}\%$$

Dengan pembobotan kategori, sebagai berikut:
- Informatif (Bobot 5);
- Menuju Informatif (Bobot 4);
- Cukup Informatif (Bobot 3);
- Kurang Informatif (Bobot 2);
- Tidak Informatif (Bobot 1).

D. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI

1. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2022 Palinfo memperoleh anggaran sebesar Rp11.634.920.000 dengan serapan sebesar Rp11.037.757.153 atau 94,87%. Rincian dari penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Rincian Penggunaan Anggaran Palinfo Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1		2	3	4
3868	**Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik**	**Rp14.446.905.000**	**Rp14.405.440.444**	**99,71**
EBA.963	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**Rp11.743.596.000**	**Rp11.707.594.120**	**99,69**
3868.EBA.963	**Layanan Data Dan Informasi**	**Rp4.893.596.000**	**Rp4.869.994.605**	**99,52**
051	Pengelolaan Infrastruktur TIK Terintegrasi	Rp937.512.000	Rp935.533.200	99,79
052	Pemuktahuran Data dan sistem informasi	Rp509.391.000	Rp508.235.173	99,77
053	Pengelolaan Sistem manajemen TIK	Rp420.268.000	Rp418.700.030	99,63
054	Implementasi SPBE	Rp271.127.000	Rp269.077.139	99,24
055	Layanan Keterbukaan Informasi	Rp105.046.000	Rp103.608.070	98,63
056	Media Monitoring	Rp209.883.000	Rp208.404.880	99,30
057	Penyusunan Bahan Diseminasi dan Informasi Publik	Rp772.421.000	Rp771.862.400	99,93
058	Pengelolaan Perpustakaan	Rp280.347.000	Rp275.150.432	98,15

059	Pelaksanaan Edukasi Publik	Rp806.423.000	Rp803.190.637	99,60
060	Dialog Nasional Kelembagaan	Rp360.000.000	Rp355.465.261	98,74
061	Layanan Penerjemahan	Rp221.180.000	Rp220.767.383	99,81
3868.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**Rp6.850.000.000**	**Rp6.837.599.515**	**99,82**
002	**Operasional dan pemeliharaan kantor**	**Rp6.850.000.000**	**Rp6.837.599.515**	**99,82**
3868.EBD.	**Layanan Manajemen Kinerja Internal**	**Rp2.703.309.000**	**Rp2.697.846.324**	**99,80**
3868.EBD.001	**Dokumen Hasil Kajian Kelembagaan**	**Rp1.907.509.000**	**Rp1.904.667.709**	**99,85**
051	Dokumen Hasil Kajian Kelembagaan	Rp341.424.000	Rp340.103.865	99,61
052	Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi	Rp790.202.000	Rp789.081.914	99,86
053	Analisis Putusan	Rp775.883.000	Rp775.481.930	99,95
3868.EBD.002	**Falititasi Fungsional Penata Kehakiman**	**Rp680.000.000**	**Rp677.411.844**	**99,62**
051	Pengelolaan administrasi fungsional Penata Kehakiman	680.000.000	677.411.844	99.62
3868.EBD.953	**Layanan Pemantauan dan Evaluasi**	**Rp115.800.000**	**Rp115.766.771**	**99,97**
051	Laporan dan Evaluasi Kinerja Palinfo	Rp115.800.000	Rp115.766.771	99,97

2. EFISIENSI ANGGARAN

	RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	Efisiensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(7)=∑(6)/∑(3)
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik		Rp14.446.905.000	Rp14.405.440.444	50,72%
3868.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Rp11.743.596.000	Rp11.707.594.120	
3868.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	100.00%	Rp4.893.596.000	Rp4.869.994.605	
3868.EBA.994	Layanan Perkantoran	100.00%	Rp6.850.000.000	Rp6.837.599.515	
3868.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Rp2.703.309.000	Rp2.697.846.324	
3868.EBD.001	Dokumen Hasil Kajian Kelembagaan	100.00%	Rp1.907.509.000	Rp1.904.667.709	
3868.EBD.002	Falititasi Fungsional Penata Kehakiman	100.00%	Rp680.000.000	Rp677.411.844	
3868.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100.00%	Rp115.800.000	Rp115.766.771	

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari table di atas, berikut analisis efisiensi terhadap sasaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik memiliki kinerja 100% dan realisasi anggaranya mencapai 99,71%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 50,72%.

BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) ini merupakan uraian yang menginformasikan kinerja Palinfo di tahun 2023 yang barang tentu untuk mendukung penguatan kelembagaan Komisi Yudisial. Kesimpulannya adalah Palinfo di tahun 2023 telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi tahun 2023. Diharapkan laporan ini akan memberikan informasi serta gambaran tentang kemunculan, perkembangan, realisasi program, dan segala hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Palinfo.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Periode 2020 s.d. 2024, setiap bulannya selalu dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Palinfo Periode 2020 s.d. 2024 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan organisasi sebagaimana dituangkan dalam Renstra Palinfo dalam Periode 2020 s.d 2024 selalu dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja yang ada di internal Palinfo sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Demikian laporan kinerja Palinfo tahun 2023 ini disusun dengan sebenarnya dan diharapkan dapat dipergunakan untuk evaluasi secara bersama sehingga di kemudian hari capaian kinerja Palinfo dan/atau Komisi Yudisial secara umum akan semakin baik dan dapat didukung dengan penganggaran yang signifikan.

Lampiran-lampiran

1. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juma'in, S.E.
Jabatan : Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M. Hum
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,

Arie Sudihar, S.H., M. Hum
NIP 19710123 199803 1 003

Pihak Pertama,

Juma'in, S.E.
NIP 19680515 198812 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

Sasaran Program:

1. **Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien**
2. **Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif**
3. **Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	1. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi	3 Aplikasi
		2. Persentase pemutakhiran data dan informasi	75%
2.	Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001
3.	Terlaksanannya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomendasi
4.	Meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	1. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (IKIP)	Menuju informasi
		2. Kategori aktivitas positif melalui media monitoring	Kategori positif
5.	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hukum	1. Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	15%
		2. Laporan pengelolaan perpustakaan	1 laporan
		3. Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di Bidang Yudisial	45000
6.	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas

Kegiatan:

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik

Alokasi anggaran TA 2023 terblokir

Anggaran:

Rp14.695.800.000,00

Rp2.012.372.000,00

Jakarta, 2 Januari 2023

Sekretaris Jenderal,

Arie Sudihar, S.H., M. Hum

NIP 19710123 199603 1 003

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi,

Jumadin, S.E.

NIP 19680515 198912 1 001

2. Certificate of Registration ISO

CQA GLOBAL
WE INSPIRE IN TRUST

CERTIFICATE OF REGISTRATION

ISO/IEC 27001:2022

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS

This is to certify, that:

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jalan Kramat Raya No.57, RT.08 / RW.08, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat - 10450

Scope of Certification

The provision of Information Security Management Systems of Data Center, Help Desk, Application and Infrastructure Operation at Data and Information Services

This is in-accordance with Statement of Applicability Document, Number 12/AL.2/SI.04/02/2023, Revision 5.0, Released date 13 February 2023

Yessiva, S.T., M.B.A.
President Director

Cert. Number: **ISMS1001009**

Initial Certification Date	: 02 February 2018
Latest Certification Date	: 22 January 2024
Issue Date	: 23 January 2024
Expired Date	: 31 January 2027

(scan me) (Barcode KAN)

KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Komisi Yudisial
Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id

komisiyudisial.go.id @komisiyudisialri Komisi Yudisial RI @KomisiYudisial Komisi Yudisial